



PETA KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGAPAN PANDEMI COVID-19 SECARA NASIONAL

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Disampaikan dalam Webinar Kearsipan Nasional Mengubah Ancaman Covid-19 menjadi Peluang dalam Mendukung Terwujudnya Penyelamatan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas dan Warisan Dokumenter

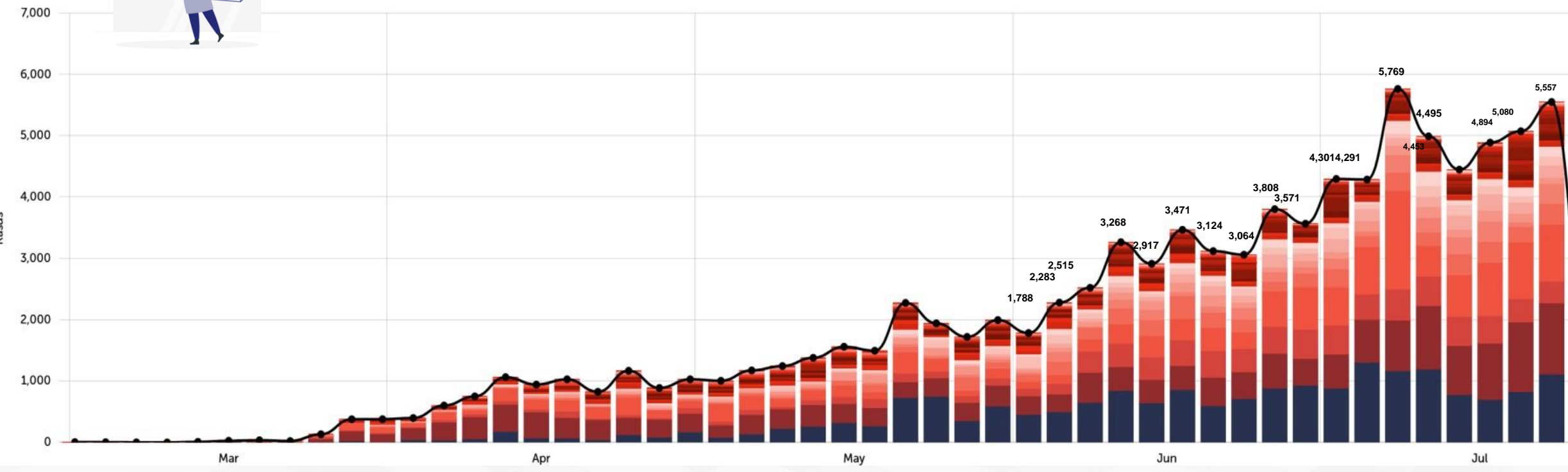
Jakarta, 5 Agustus 2020



Perkembangan Terkini Kasus Covid-19 di Dunia



* Grafik berdasarkan analisis per 3 hari data individual yang telah diverifikasi oleh PHEOC Kementerian Kesehatan per 25 Juli 2020. Sumber : Satgas Percepatan Penanganan Covid-19



Top 5 Provinsi Jumlah Kasus Tertinggi:

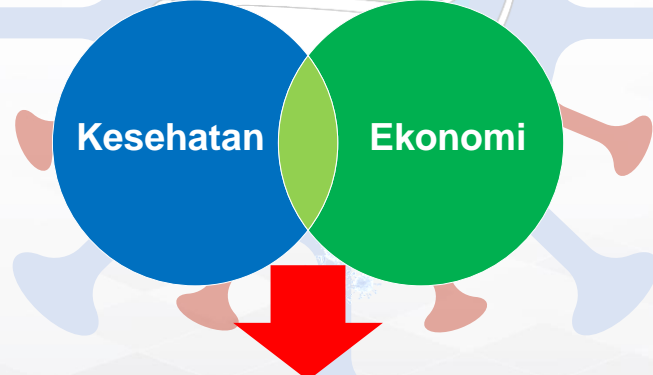
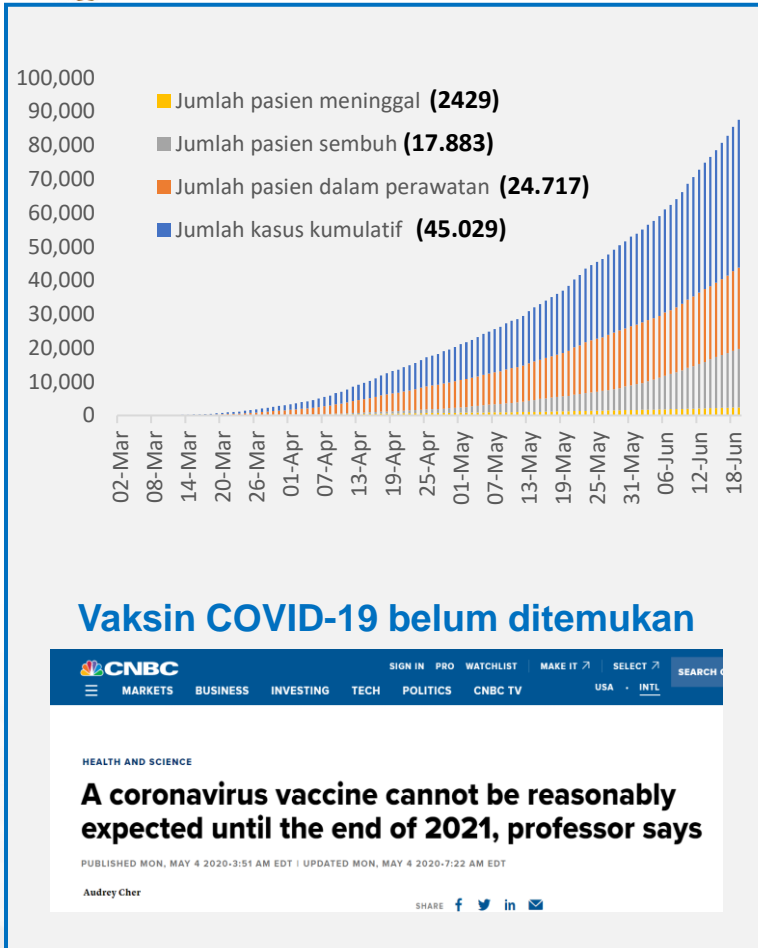
1. Jawa Timur (20,256)
2. DKI Jakarta (17,529)
3. Sulawesi Selatan (8,748)
4. Jawa Tengah (8,336)
5. Jawa Barat (5,889)

Top 5 Provinsi Jumlah Kasus Terendah:

1. Nusa Tenggara Timur (137)
2. Jambi (139)
3. Aceh (168)
4. Kep. Bangka Belitung (186)
5. Sulawesi Barat (187)



Fakta Covid-19 di Indonesia



Kondisi ekonomi memburuk berdampak masalah sosial-politik

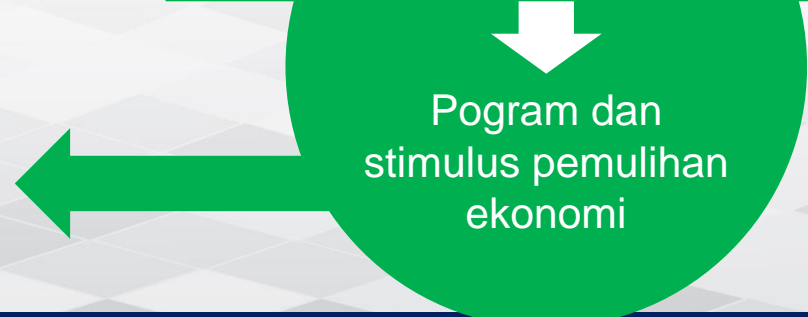
-5.2%
Pertumbuhan ekonomi global diprediksi menyentuh 5,2% di tahun 2020 (Worldbank, 2020)

2,97%
PDB Indonesia di kuartal pertama 2020 menurun menjadi 2,97% dari kuartal sebelumnya sebesar 5,07%.

-0.4 – 1%
Prediksi PDB Indonesia pada tahun 2020



KEBIJAKAN NORMAL BARU (NEW NORMAL)





Regulasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19



Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



Perpres No. 82/2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)



PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19



Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pandu *new normal* an Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi



New Normal: Berdampingan dengan Covid-19?

Penyesuaian Fokus Kebijakan Pembangunan Indonesia

2020

Fokus pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stabilitas ekonomi

2021

Fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Covid-19

TEMA RKP 2021

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"

FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2021



Percepatan Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi



Reformasi Sistem Kesehatan Nasional



Reformasi Sistem Perlindungan Sosial



Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

MAJOR PROJECT YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

- Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
- **MP Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas**
- **MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas**
- **MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter**
- **MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**
- **MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**

**) merupakan Major Project baru yang diusulkan untuk tahun 2021*



FOKUS PEMBANGUNAN RKP 2021



SASARAN

- Pertumbuhan industri pengolahan **4,7-5,5%**
- Kontribusi PDB industri pengolahan **19,6-19,8%**
- Pertumbuhan ekspor industri pengolahan **7,0-9,8%**
- Devisa pariwisata **US\$ 4,8-8,5 miliar**
- Kontribusi PDB pariwisata **4,2%**
- Nilai realisasi PMA dan PMDN **Rp. 858,5 T**
- Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan **Rp. 268,7 T**
- **Termasuk potensi IKN**



Industri



Pariwisata



Investasi

Pemulihan Ekonomi

Perkuatan

- Ketersediaan Beras **42,7 juta ton**
- Nilai Tukar Petani (NTP) **103**



Ketahanan Pangan



Peningkatan Kualitas Pendidikan

- Program Indonesia Pintar; KIP Kuliah dan Bidikmisi ; Revitalisasi SMK dan PT Vokasi; Revitalisasi Perguruan Tinggi; DAK Fisik Pendidikan; Pelatihan Guru.

Reformasi

FOKUS



Reformasi Sistem Kesehatan

Bantuan pendidikan dokter spesialis; Puskesmas dengan 9 jenis tenaga; Pengembangan sistem terpadu surveilans *real-time*; Penambahan mesin TCM; Introduksi vaksin PCV; dan Penguatan *telemedicine* .



Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Penurunan kemiskinan; Akurasi data; dan **konsolidasi bantuan dan jaminan sosial**



Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

- Penguatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- Penguatan sistem tata kelola penanggulangan bencana.

SASARAN



PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

PP Nomor 23 Tahun 2020

PRINSIP

1. Asas keadilan sosial
2. Mendukung pelaku usaha
3. Memperhatikan kaidah kebijakan prudent dan tata kelola yang baik
4. Tidak menimbulkan *moral hazard*
5. Adanya pembagian biaya dan risiko antarstakeholders

RUANG LINGKUP

Belanja APBN a.l Subsidi bunga ke UMKM melalui lembaga keuangan

- Penempatan dana untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi

Penjaminan untuk kredit modal kerja

- Penyertaan modal negara untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus

Investasi Pemerintah (untuk Modal Kerja)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19





TATA KELOLA PEMERINTAH



Penyederhanaan birokrasi

- Deeselonisasi
- Jumlah pegawai
- Penyederhanaan struktur
- Pembubaran LPNK

Reformulasi sistem manajemen ASN

- Perencanaan kebutuhan ASN
- Manajemen talenta
- Sistem merit

Lebih intensif
selama
pandemi
COVID-19

Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

- Penggunaan *e-government*

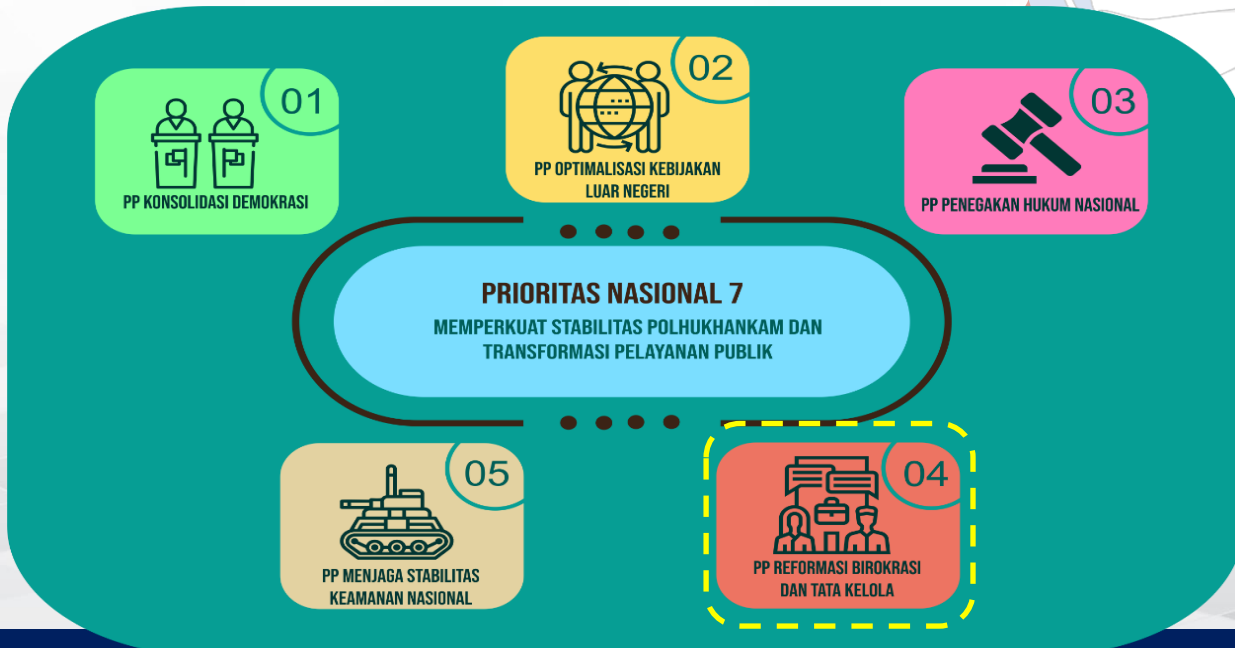
Akuntabilitas Kinerja

- Penilaian kinerja organisasi dan individu

Kebijakan *Flexible Working*



KEARSIPAN DALAM RKP 2021



Kegiatan PN 7 yang mendukung penanganan pandemi COVID-19

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 secara merata dan berkeadilan melalui berbagai media di pusat dan daerah;
2. ...
11. Penguatan pelayanan publik terpadu dan berbasis elektronik (*e-service*), terutama layanan dasar dan perizinan;
12. Percepatan penerapan aplikasi umum pemerintahan untuk mendukung kinerja ASN, dan
13. Peningkatan rumah sakit Kemhan/TNI dan Polri; peningkatan operasi militer selain perang (OMSP) penanggulangan bencana dan kontingensi.



PENDOKUMENTASIAN ARSIP PADA MASA PANDEMI COVID-19

UNESCO: *Turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater support to documentary heritage.*



Pembuat kebijakan di sektor publik dan swasta mengakui bahwa di masa pandemi Covid-19, arsip dan *records management* menjadi penting dan bernilai.

1 Keputusan atau kebijakan harus didokumentasikan secara menyeluruh

2 Catatan dan data harus diamankan dan dilestarikan di semua sektor
→ Untuk pembuktian dalam rangka mencegah atau mengantisipasi kejadian serupa

3 Rekomendasi mengenai pelestarian, dan akses ke warisan dokumenter ke dalam bentuk digital.

Sumber :
COVID-19: *The duty to document does not cease in a crisis, it becomes more essential*



SE MENPAN RB NO. 62
TAHUN 2020



Penyelamatan arsip penanganan Covid-19 merupakan bukti akuntabilitas kinerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjaga ketersediaan arsip untuk generasi mendatang.



Terima

Kasih

LAMPIRAN



TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA 2021

Pemulihan Investasi, Industri Manufaktur dan Pariwisata Dipercepat untuk Mendorong Pertumbuhan



INVESTASI



| | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|-------|-------|---------------------|
| Kenaikan Investasi (PMTB) (%) | 4,5 | -0,9 | 6,0-7,1 |
| Kontribusi PMTB thd PDB (%) | 32,3 | 31,4 | 31,5-31,8 |
| Realisasi Investasi (Rp Triliun) | 809,6 | 817,2 | 858,5 ¹⁾ |

Pandemi Covid 19 menunda realisasi investasi dan mempengaruhi risiko investasi.

1) target BKPM

INDUSTRI MANUFAKTUR



| | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Pertumbuhan Industri Pengolahan (%) | 3,8 | 0,1 | 4,7-5,5 |
| Kontribusi thd PDB (%) | 19,7 | 19,5 | 19,6-19,8 |
| Tenaga Kerja (Juta Orang) | 18,9 | 17,4 | 17,9 |
| Ekspor (USD Miliar) | 126,6 | 114,8-117,2 | 122,8-127,5 |

Selama pandemi Covid-19, industri masih beroperasi dengan utilisasi sekitar 25%-78%.

| | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|
| Devisa (USD Miliar) | 19,7 | 3,3-4,9 | 4,8-8,5 |
| Tenaga Kerja (Juta Orang) | 12,6 | 10,0 | 10,5 |
| Kontribusi thd PDB (%) | 4,7* | 4,1 | 4,2 |

Pembatasan mobilitas selama Covid-19 menyebabkan industri pariwisata "berhenti sementara".

*Angka prognosa

PARIWISATA



STRATEGI PEMULIHAN

INVESTASI

- Eksekusi investasi yang "mangkrak", dan investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur
- Peta potensi investasi daerah
- Fasilitas relokasi investasi asing
- *Debtlenecking* dan *aftercare* investasi melalui pendampingan investor
- Perluasan *positive list* investasi
- Deregulasi dan integrasi perizinan

INDUSTRI MANUFAKTUR

- *Re-skilling* dan *up-skilling*
- Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri termasuk oleh pemerintah dan BUMN
- Substitusi impor dan TKDN
- Penurunan biaya energi dan logistik
- Peningkatan ekspor hasil industri
- Percepatan operasionalisasi Kawasan Industri
- Inovasi dan adaptasi teknologi

PARIWISATA

- Reaktivitas pasar wisatawan domestik dan mancanegara
- Reorientasi pada pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*), tidak hanya pada *mass tourism*
- Percepatan 5 Destinasi Super Prioritas/DSP (Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Likupang), dan 5 DSP berikutnya (BTS, Wakatobi, Bangka Belitung, Raja Ampat, Morotai), serta penguatan Bali dan Batam/Bintan
- Pengembangan Benoa untuk mendukung Bali sebagai *tourism hub*
- Penambahan *direct flight*
- Penerapan standar kebersihan dan keselamatan
- *Re-skilling & up-skilling*



Reformasi Sistem Kesehatan





Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Opsi Kebijakan: Pemutakhiran Data dan Penyesuaian Target

STRATEGI:

1. Persiapan:

- ✓ Mekanisme dan instrumen pemutakhiran DTKS 2021.
- ✓ Pemodelan *Proxy Means Test* (PMT).
- ✓ Peningkatan kapasitas Pemda dalam pemutakhiran data.

2. Data memperkuat integrasi dan penyederhanaan program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.

Digitalisasi Monograf Desa



NIK dan Data Kependudukan
Data Penerima Program (Data Program
Bansos, Dapodik)

Akurasi Target

43%

50%

60%

70%

Tingkat Kemiskinan

9,4%

9,2%

8,98%

8,74%

Anggaran PKH

29 T

23 T

23 T

23 T

Sasaran PKH (Juta KPM)

10

8

8

8

Sumber: Susenas 2019, disimulasikan Bappenas

LAYANAN SOSIAL



BANTUAN SOSIAL



TINGKAT PENDAPATAN



JAMINAN SOSIAL

Atas, Menengah, Menuju
Menengah

Rentan

Kesehatan dan KK,
Hari Tua, Pensiun,
Kematian, Tapera,
Perawatan Jangka
Panjang

PBI Kes, PBI
Ketenagakerjaan



Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana

Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

01

Bencana Alam, fokus pada Penguatan Sistem dan Respon Peringatan Dini

02

Bencana Non Alam, fokus pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana

S
T
R
A
T
E
G
I



Memperkuat Manajemen Bencana yang Kolaboratif

Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana



Menyusun Rencana Penanganan Darurat

Memperkuat manajemen krisis terpadu



Memperkuat sistem data bencana terpadu

Memperkuat sistem logistik & jaring pengaman sosial



Peningkatan Kesiapsiagaan pada masa pra-bencana



Penguatan sistem operasi tanggap darurat



Penguatan kapasitas adaptif dan ketangguhan masyarakat

Fokus Investasi



KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID 19 DI PROVINSI JAWA TENGAH

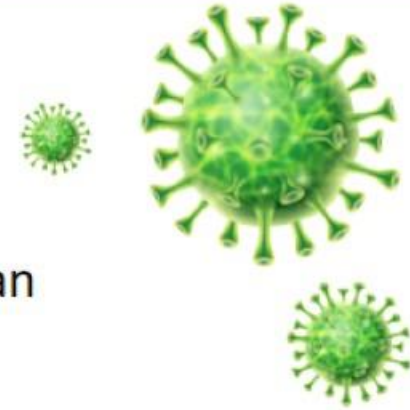
OLEH:

**H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH**

1

PELAKSANAAN PENANGANAN PANDEMI COVID 19

GAMBARAN UMUM (2)



SARS-CoV-2 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*



DEMAM



BATUK



NYERI
TENGGORAKAN



SESAK

80% PADA UMUMNYA GEJALA RINGAN-SEDANG

15% GEJALA BERAT

5% MEMBUTUHKAN PERAWATAN ICU (KRITIS)

Kasus berat dan kematian meningkat pada orang yang dengan kondisi penyerta:

P. Jantung, DM Penyakit Paru Kronis, Hipertensi, Kanker, usia >60 tahun

Masalah Pandemi Covid-19

- Masalah utama pada aspek kesehatan, dengan tujuan **memutus rantai penularan**
- Implikasinya bisa menyangkut sektor-sektor lain di luar kesehatan
- Pendekatan bidang kesehatan meliputi aspek ***public health*** dan clinical management.
- Untuk public health di Jateng diterapkan program **JOGO TONGGO**

Kapan pembatasan sosial dapat dilonggarkan?

Pembatasan Sosial tidak dapat langsung diakhiri dan kita kembali ke kondisi sebelum ada pandemi Covid19.

PSBB dapat dilonggarkan tergantung dari kondisi epidemi & dapat diketatkan kembali.

Selama vaksin belum ditemukan. Kita harus hidup dalam adaptasi kebiasaan baru (AKB).

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Selama vaksin belum ditemukan → Kita harus hidup dalam AKB.

Mempersiapkan masyarakat memasuki tata hidup baru dengan:

- Melakukan sosialisasi, edukasi dan promosi kesehatan mengenai protokol kesehatan.
- Disiplin menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggunakan masker, jaga jarak sehat (social/physical distancing), cuci tangan pakai sabun (CTPS), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dengan olahraga teratur/istirahat yang cukup, meningkatkan imunitas tubuh melalui konsumsi buah, sayur dan gizi seimbang.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID 19

segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan COVID 19

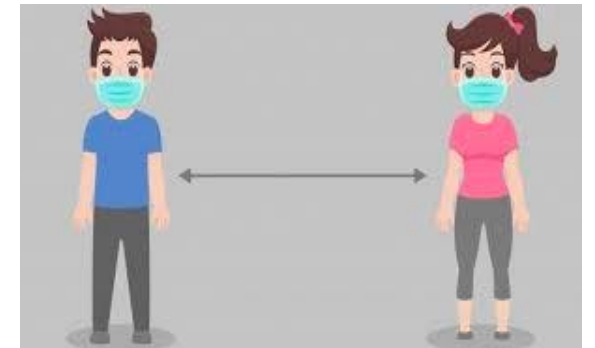
INDIVIDU & KELUARGA



MASYARAKAT- DESA



MASYARAKAT- TEMPAT UMUM



MEMEMUTUS RANTAI PENULARAN

Pemutusan Mata Rantai Penularan COVID-19 di Level Individu, Keluarga dan Masyarakat

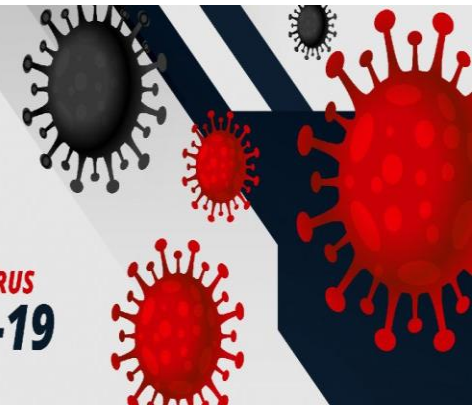


- ❖ Agar infeksi dapat menyebar, setiap mata rantai harus tersambung, **maka**
- ❖ Memutuskan sambungan mana pun akan menghentikan penularan!

Sumber: WHO

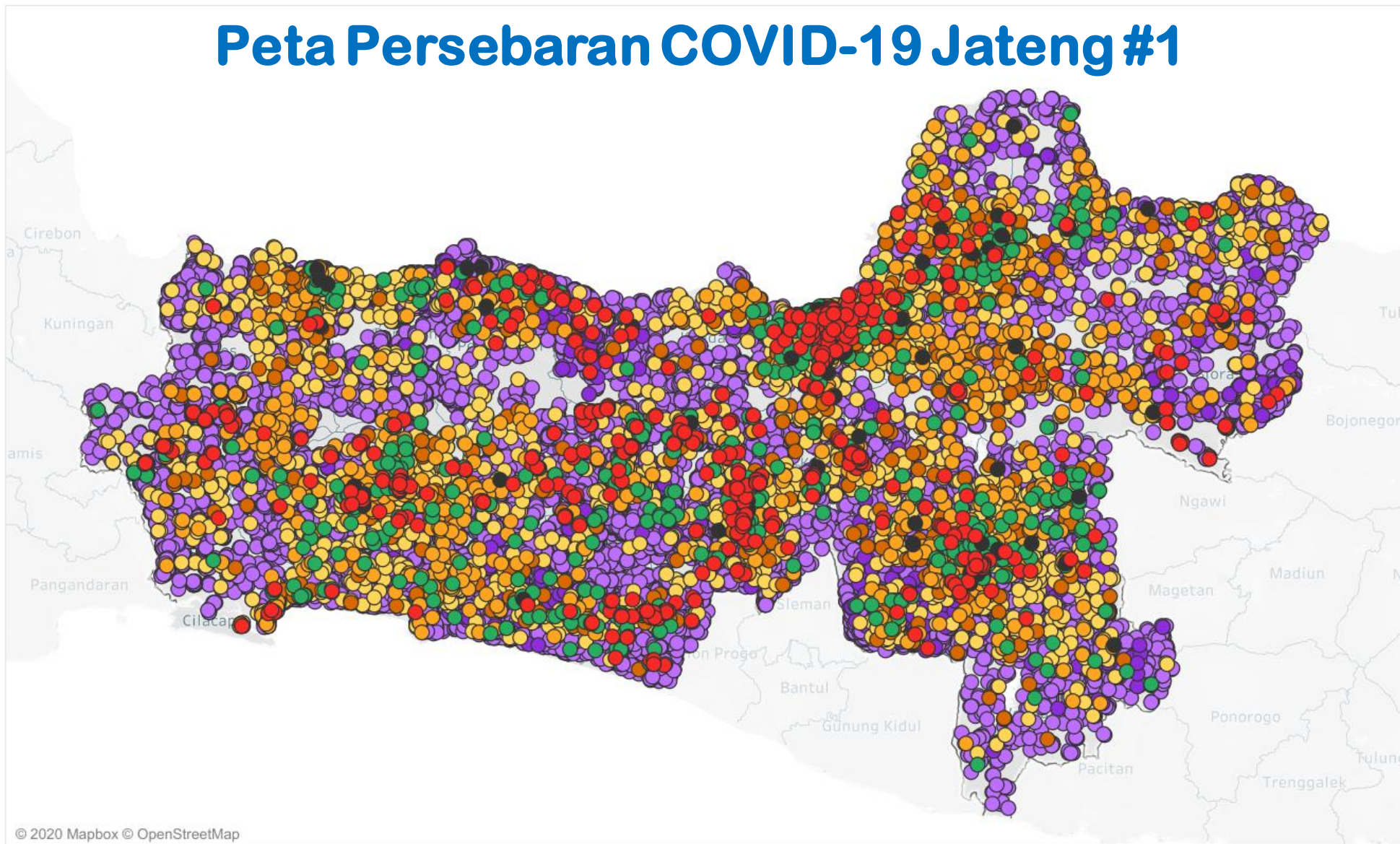
Kondisi Terkini Jateng

**CORONAVIRUS
COVID-19**



| | | | |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| COVID Dirawat | COVID Sembuh | PDP Meninggal | ODP Proses |
| COVID Meninggal | PDP | PDP Sembuh | ODP Selesai |

Peta Persebaran COVID-19 Jateng #1



Setiap titik merujuk pada titik acak dalam area Kelurahan/Desa (bukan titik lokasi/tempat tinggal pasien).

Data yang ditampilkan dalam peta terus diperbaharui sesuai dengan informasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Data: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

corona.jatengprov.go.id

DATA CUT OFF

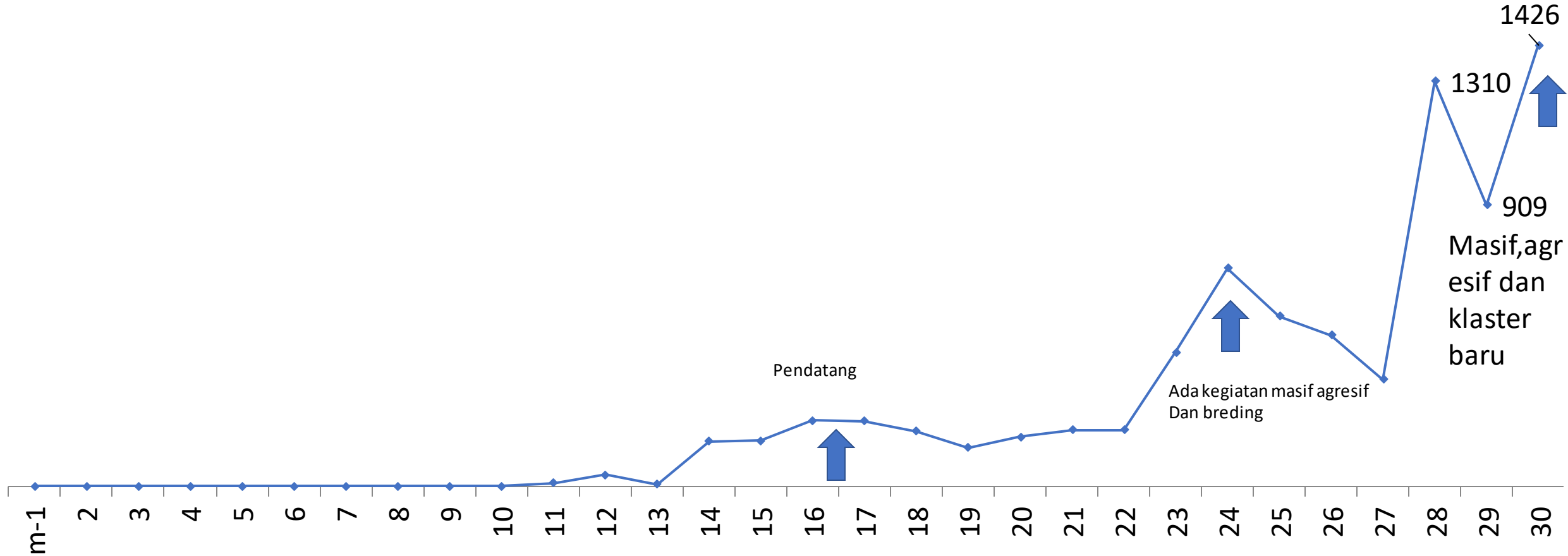
Update Terakhir : 04-08-2020 12:08:02 WIB

| ODP | PDP | Positif | ODP | PDP | Positif |
|---|---|--|---|--|--|
| 46.749 Total kasus | 11.986 Total kasus | 10.214 Total kasus | 50.937 Total kasus | 11.981 Total kasus | 10.225 Total kasus |
| Dalam Pemantauan 430 ^{±17} | Pasien Dirawat 1.177 ^{±20} | Pasien Dirawat 2.791 ^{±135} | Dalam Pemantauan 430 ^{±0} | Pasien Dirawat 1.137 ^{±0} | Pasien Dirawat 2.779 ^{±0} |
| Selesai Pemantauan 46.319 ^{±0} | Pasien Sembuh 9.166 ^{±116} | Pasien Sembuh 6.507 ^{±406} | Selesai Pemantauan 50.507 ^{±0} | Pasien Sembuh 9.203 ^{±0} | Pasien Sembuh 6.525 ^{±0} |
| | Pasien Meninggal 1.643 ^{±22} | Pasien Meninggal 916 ^{±20} | | Pasien Meninggal 1.641 ^{±0} | Pasien Meninggal 921 ^{±0} |

DATA Real Time

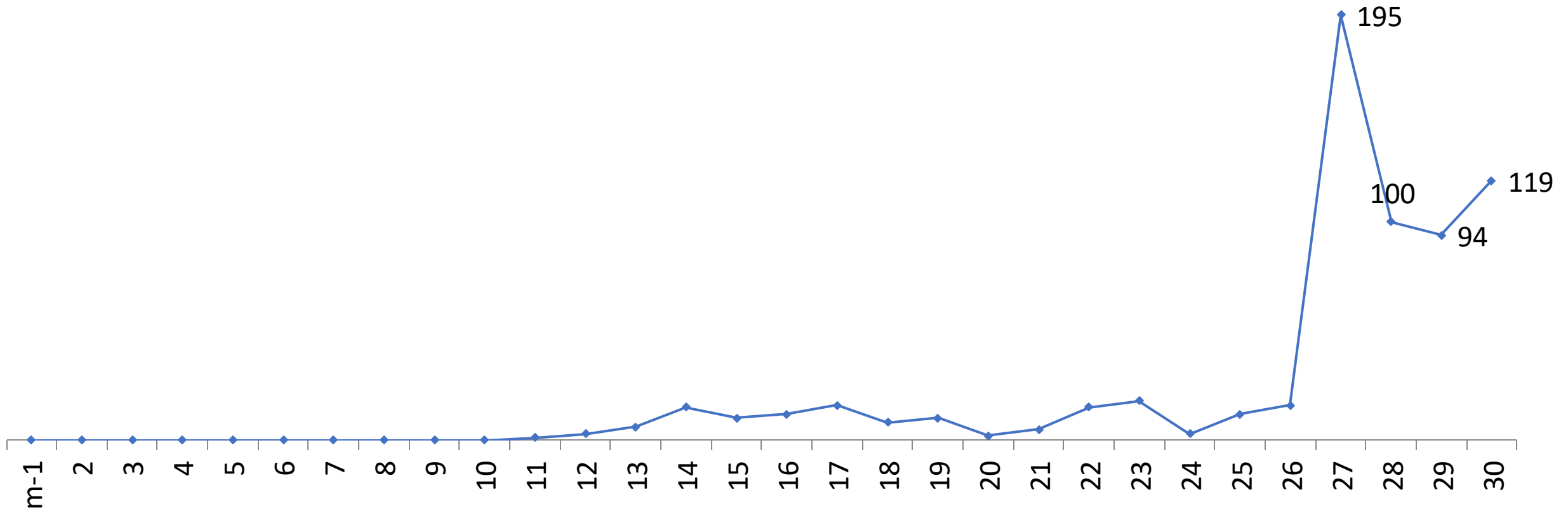
Update Terakhir : 04 Aug 2020 12:17 WIB

KASUS COVID 19 DI JATENG MENURUT MINGGU KEJADIAN sd m 30 TH 2020



Tren covid 19 di Jateng fluktuatif minggu 24,28, 30 naik krn keg masif agresif dan diperkirakan masih ada transmisi

GRAFIK MINGGUAN COVID MENINGGAL DI JATENG SD MINGGU 30 TH 2020



Kematian fluktuatif, MENGALAMI KENAIKAN TAJAM M 27

Bagaimana strategi penurunan kasus covid 19 ?



6 AKSI PENANGANAN COVID19

#1 Perkuat Puskesmas dan Jaringannya.

#2 Perkuat RS : Ruang Isolasi, ICU, Ventilator

#3 Tingkatkan kemampuan Lab. RT PCR

#4 Actif Case Finding di tingkat RT/RW

#5 Siapkan Karantina sampai desa

#6 Refokus kebijakan dalam Sosekbud & Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUS RANTAI PENULARAN

Pemutusan Mata Rantai Penularan COVID-19 di Level Individu, Keluarga dan Masyarakat



- ❖ Agar infeksi dapat menyebar, setiap mata rantai harus tersambung, **maka**
- ❖ Memutuskan sambungan mana pun akan menghentikan penularan!

Sumber: WHO

**Salah satu strategi penurunan kasus Covid 19
di Jawa Tengah**



Jogo Tonggo

JOGO TONGGO : Meningkatkan peran serta masy. dlm upaya pencegahan penularan & penyebaran COVID-19 di wil. RW.
Menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta dalam upaya pencegahan dan penularan Covid-19.

**GANJAR BENTUK SATGAS
JOGO TONGGO**

“
Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah, menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Tanah Jawa adalah desa.
”

Ganjar Pranowo

Satgas **Jogo Tonggo** dipimpin Ketua RW dan dibantu Ketua RT. Terdiri dari tim kesehatan, ekonomi, dan keamanan yang wajib melaporkan kegiatan warga setiap hari ke desa atau kelurahan.

Satgas **Jogo Tonggo** ini penting untuk memastikan kebutuhan pangan tercukupi saat masa pandemi.

Sumber: Kumparan

2. Unsur Satgas JOGO TONGGO

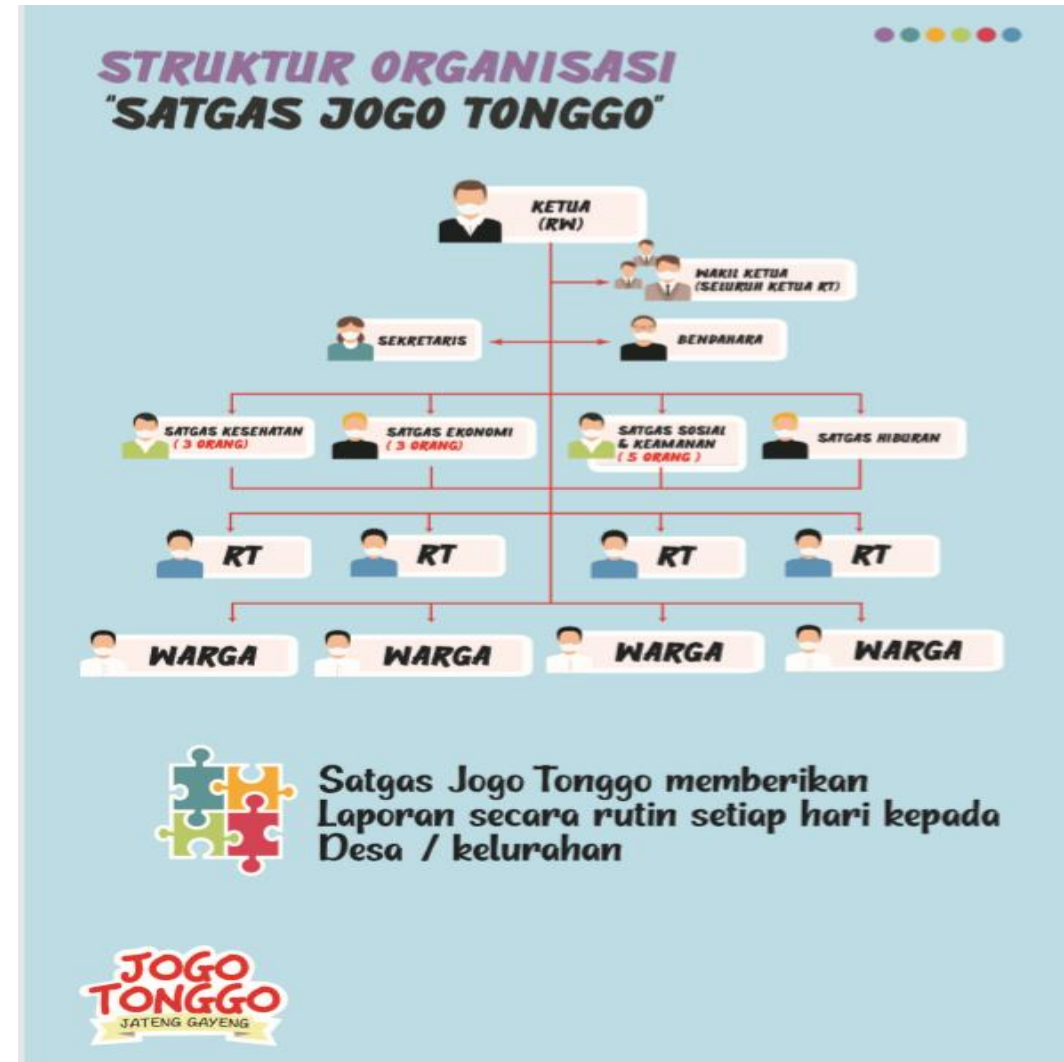


Ketua RW



Satgas kesehatan Jogo Tonggo adalah Satuan Tugas yang bertugas untuk mendorong, memastikan dan memantau terselenggaranya protokol kesehatan melawan covid-19 dengan benar dan efektif di wilayah RW

PENGGORGANISASIAN



SATGAS KESEHATAN JOGO TONGGO

Mendata setiap orang yang keluar masuk desa

Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 dengan membawa orang yang teridentifikasi PDP ke Rumah Sakit Rujukan

Memastikan dan update data siapa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP

Mengupayakan ODP dan OTG karantina mandiri 14 hari

Memastikan :

Lokasi strategis tersedia cuci tangan,
Penyemprotan disinfektan secara rutin,
warga tertib keluar rumah memakai masker,
jaga jarak fisik antar warga 1,5 - 2 meter

JOGO
TONGGO
JATENG GAYENG

STOP COVID-19

SATGAS KESEHATAN JOGO TONGGO

JOGO
TONGGO
JATENG GAYENG

Memberikan pelayanan kesehatan :
Pemeriksaan suhu badan
Pengecekan gejala covid-19
Pengecekan tempat cuci tangan

Mendorong praktik hidup bersih dan sehat
Makan Minum seimbang
Olahraga
Mandi teratur
Istirahat cukup
Lingkungan Bersih

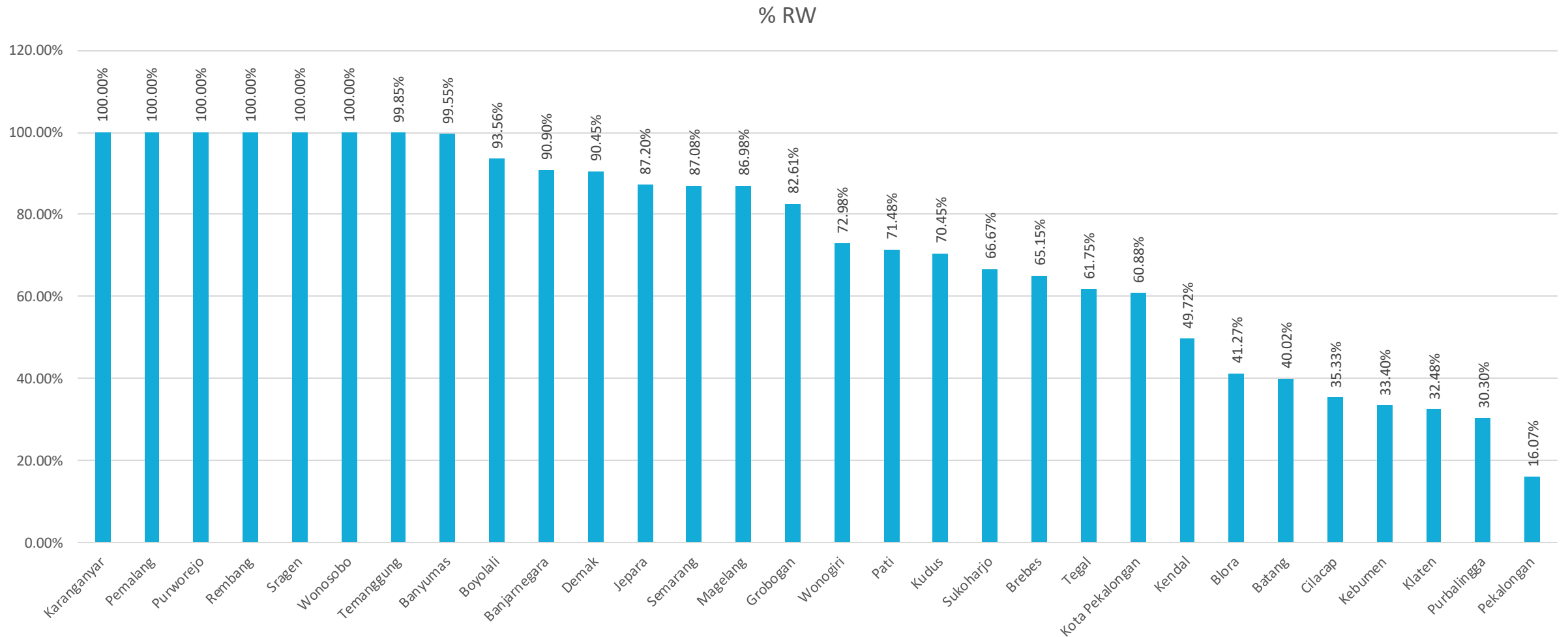
Berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa
untuk pemeriksaan lanjut
jika ada kondisi darurat



TUGAS SATGAS KESEHATAN *JOGO TONGGO*

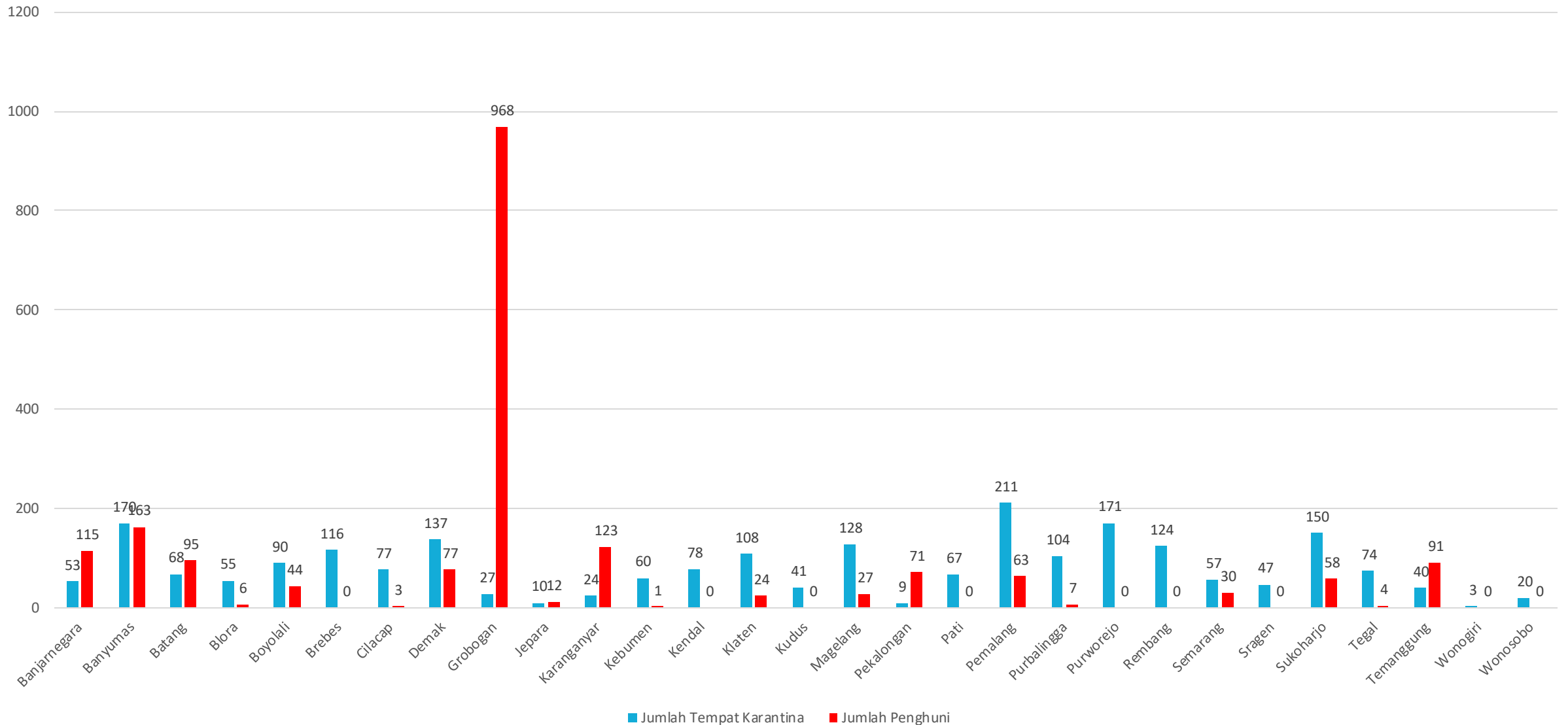
1. Mendata setiap orang yang keluar masuk desa terkait dengan indikator serangan covid-19
2. Membantu petugas kesehatan membawa orang yang teridentifikasi sebagai Pasien PDP ke RS rujukan
3. Menyarankan ODP dan OTG untuk menjalankan karantina mandiri dan menyarankan yang sehat untuk hati-hati dan waspada
4. Menanyakan ke petugas kesehatan (Puskesmas) untuk memastikan siapa saja warga RW yang berstatus sebagai OTG, ODP dan PDP setiap hari di Up date statusnya
5. Memastikan lokasi strategis tempat cuci tangan pakai sabun, jadwal, ketertiban warga RW keluar rumah wajib memakai masker, jaga jarak fisik antar warga 1,5-2 meter
6. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat (makanan dan minuman seimbang, olahraga, mandi teratur, lingkungan bersih dan istirahat yang cukup)
7. Berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Desa untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan jika dinilai ada warga dalam kondisi darurat Satgas Kesehatan Jogo Tonggo langsung membawa pasien ke fasilitas kesehatan terdekat

Persentase RW Yang Membentuk Jogo Tonggo (per 29 Juli 2020)



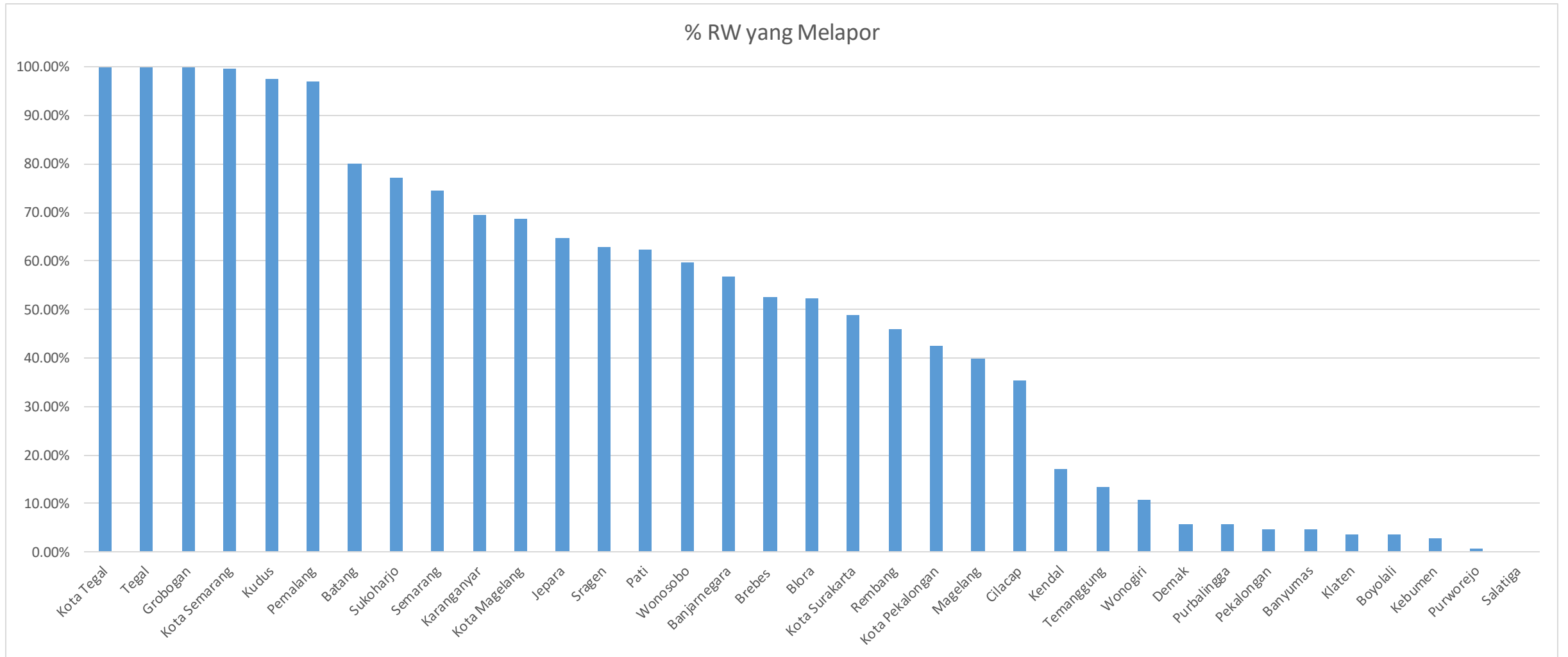
Sumber : Dispermades Prov Jateng

Data Jumlah Tempat Karantina dan Jumlah Penghuninya



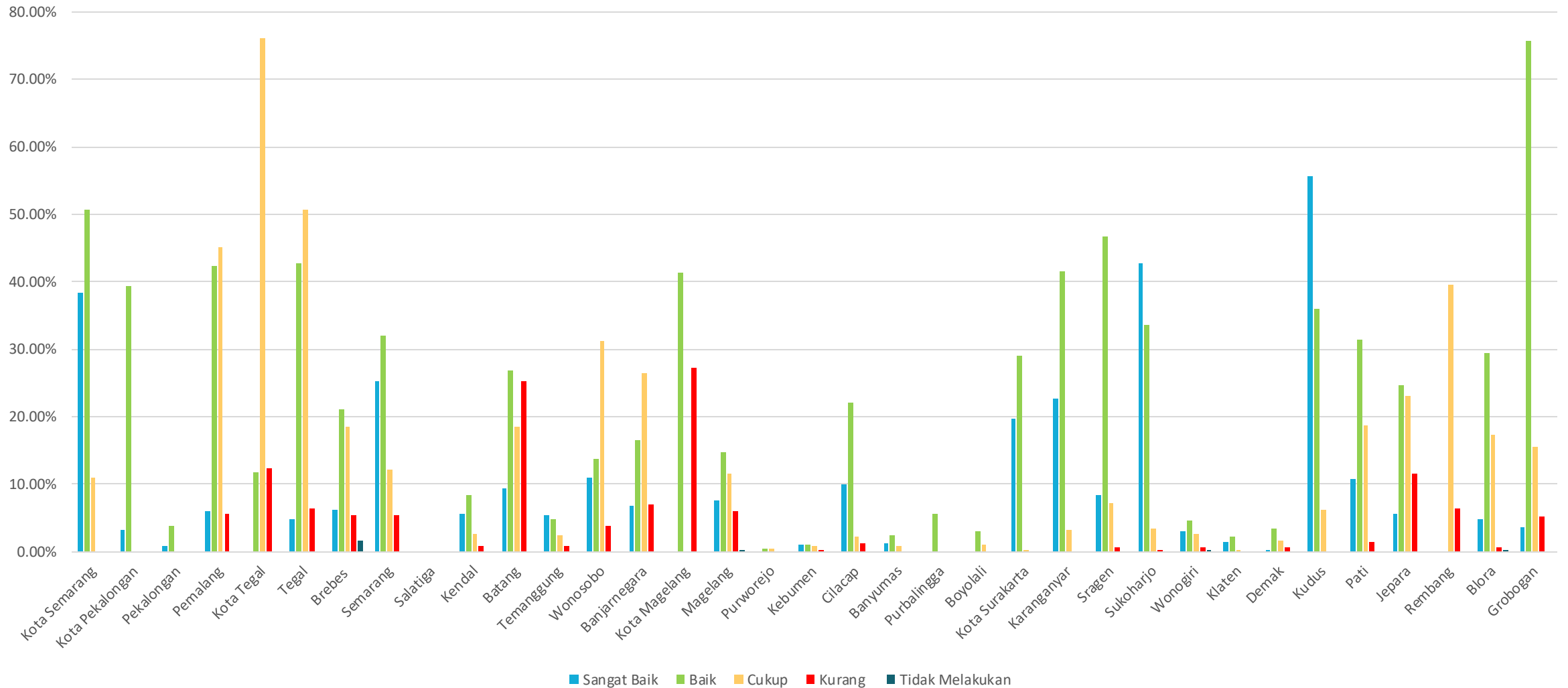
Sumber : Dispermades Prov Jateng

Persentase RW yang Memberikan Laporan Perilaku Jogo Tonggo (per 29 Juli 2020)



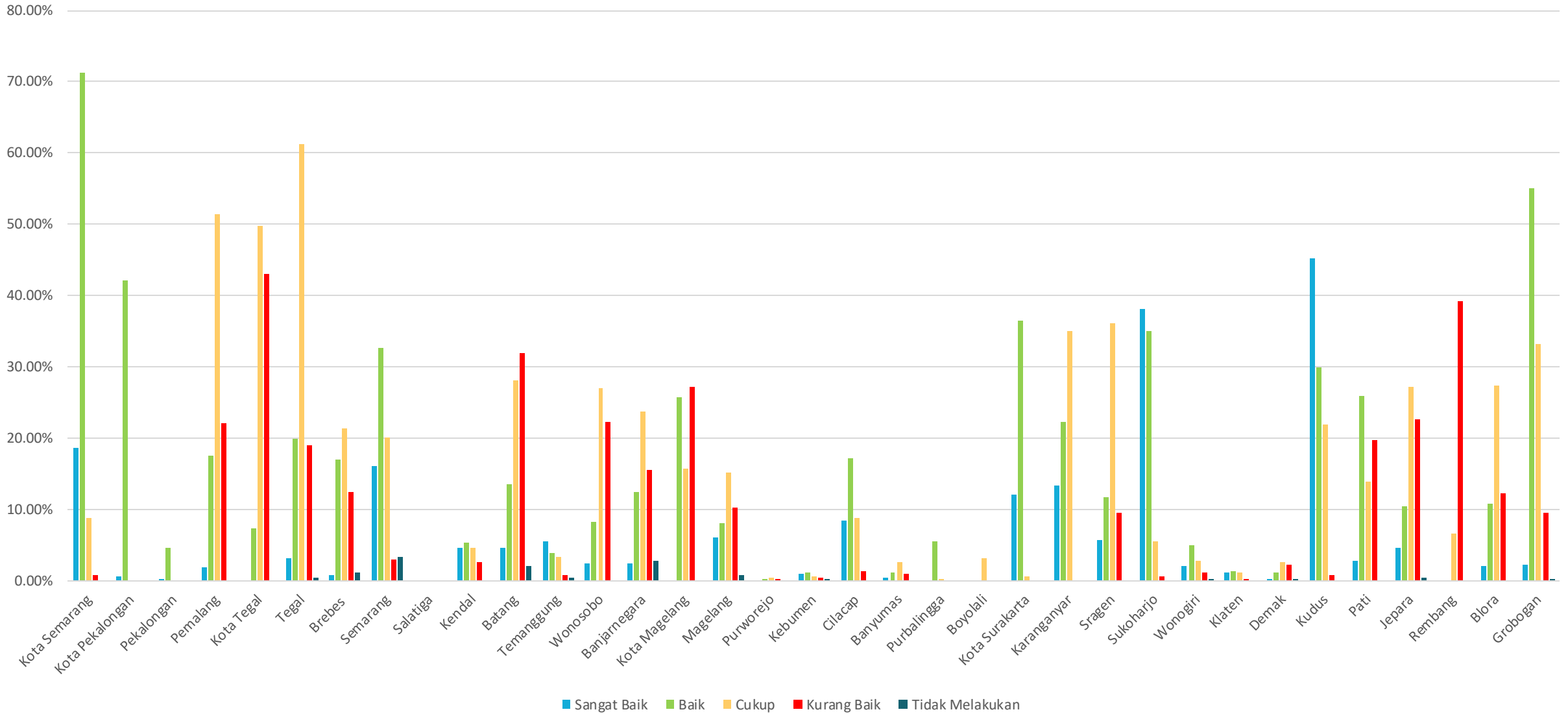
Sumber : data laporan manual Jogo Tonggo Dinkes Kab/Kota

Jumlah RW yang menerapkan Perilaku Memakai Masker (per 29 Juli 2020)



Sumber : data laporan manual Jogo Tonggo Dinkes Kab/Kota

Jumlah RW dengan menerapkan Perilaku Jaga Jarak (per 29 Juli 2020)



Sumber : data laporan manual Jogo Tonggo Dinkes Kab/Kota

2

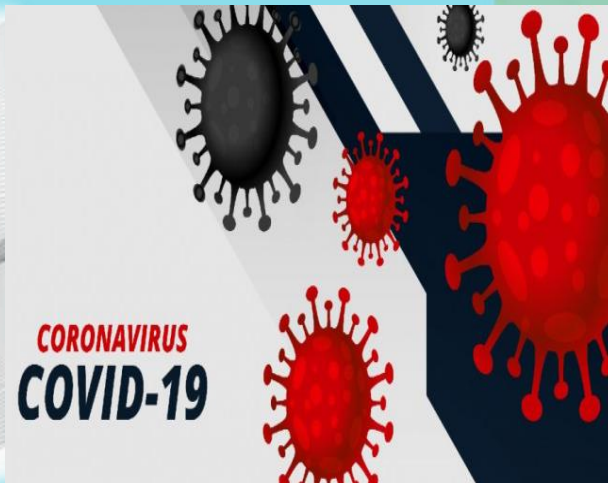
PERENCANAAN PENANGANAN COVID 19



Jateng
gayeng

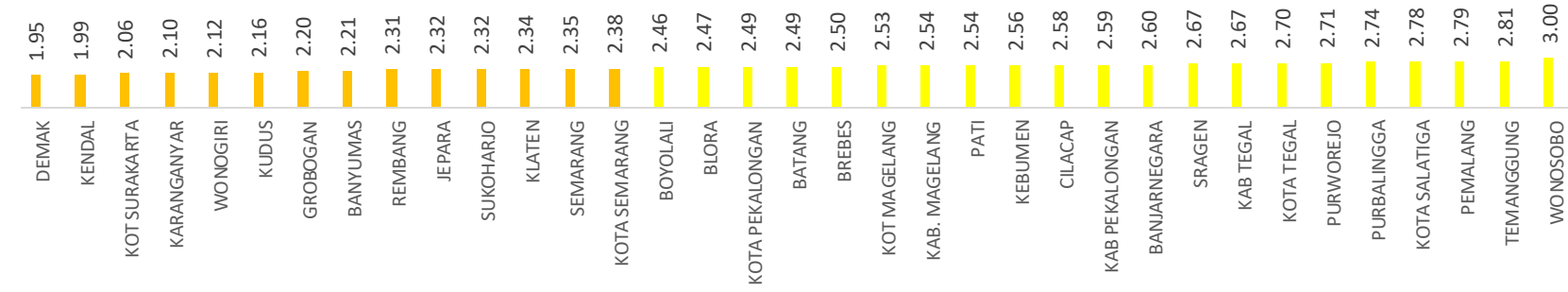


Gambaran 35 Kab-Kota

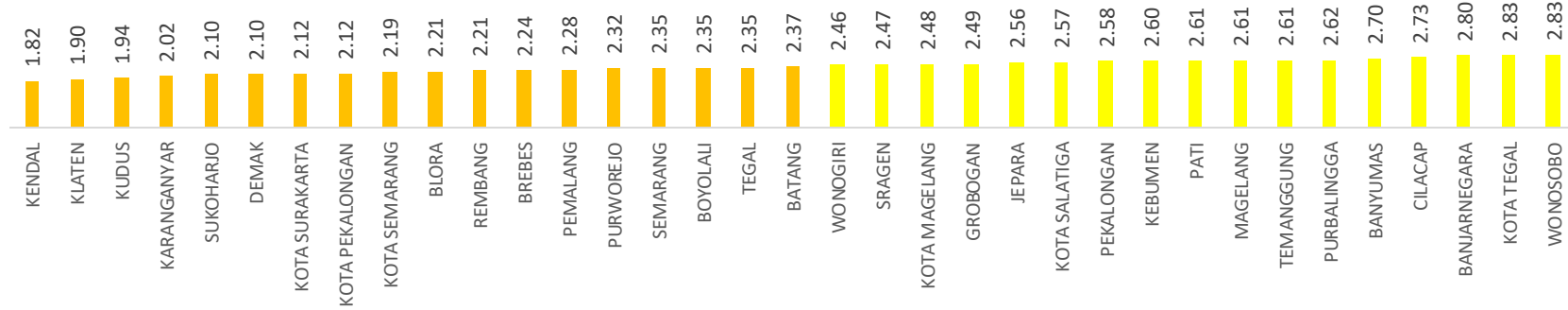


Pemetaan/ zonasi 15 Indikator

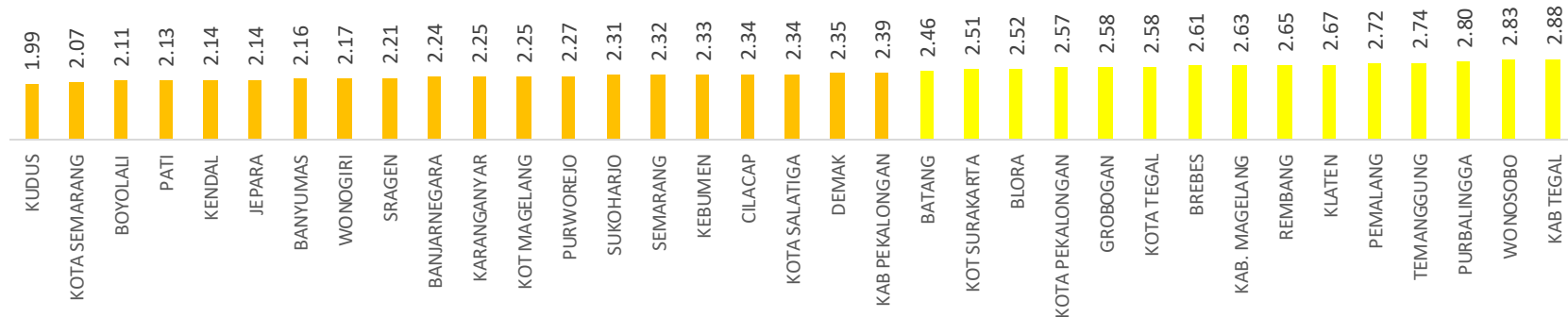
- Tidak ada Kab yang masuk dalam Zona Resiko Tinggi di minggu ini
- Resiko sedang semakin bertambah (20 Kab-kota)
- Resiko rendah semakin berkurang (15 Kab-kota)



16 Juli 2020



23 Juli 2020



30 Juli 2020

KEBIJAKAN PERENCANAAN COVID19

- 1. Memperkuat 878 Puskesmas Sejawa tengah dan Jaringannya.**
- 2. Memperkuat 230 RS Rujukan Covid (13 RS lini 1, 52 RS lini 2, 165 RS lini 3) terutama pada : Ruang Isolasi, ICU, Ventilator**
- 3. Meningkatkan kemampuan dan jejaring Lab. RT PCR (11 Lab) dan TCM (6 Lab)**
- 4. Membentuk dan mengaktifkan satgas Jogo Tonggo di seluruh RW**
- 5. Membentuk Fasilitas Karantina khusus tingkat desa**
- 6. Refokus kebijakan dalam Sosekbud & Pemberdayaan Masyarakat.**

ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI TEMPAT UMUM

PUBLIK

- Penggunaan masker
- Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*
- Penerapan *physical distancing*, jaga jarak 1-2 meter di tempat umum
- Pelaporan kasus secara mandiri
- Kontrol sosial dengan saling mengingatkan



BISNIS

- Pemeriksaan suhu tubuh
- Panduan untuk bekerja dari rumah dan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja
- Pemberlakuan *tracking* dan *tracing*
- Fasilitas cuci tangan di area publik termasuk tempat wisata
- Pembentukan tim kebersihan khusus
- UMKM memproduksi masker, *hand sanitizer*, dan pelindung wajah

PEMERINTAH

- Pengaturan sistem kerja yang produktif dan aman Covid-19
- Penanganan pelaporan kasus melalui *tracking* dan *tracing*
- Penyediaan fasilitas tes mandiri tersertifikasi (test swab, PCR)
- Pembentukan tim kebersihan khusus
- Kampanye publik di tempat-tempat umum seperti bandara, stasiun, mal, bis, pasar tradisional, restoran, tempat wisata, tempat ibadah, sekolah dan kampus, bioskop, dan fasilitas olahraga



#MenujuNormalBaru



ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI TEMPAT KERJA





ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PASAR





ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI TEMPAT IBADAH



MASJID-MUSHALLA SIAGA JAGA KEBERSIHAN MASJID DAN MUSHALLA DARI COVID-19 (CORONA VIRUS)



Teratur menjaga kebersihan lantai Masjid/Mushalla dengan cairan *disinfectant*



Menjaga kebersihan karpet dan alas shalat lainnya dengan rutin/konstan (penggunaan *vacuum cleaner* atau alat pembersih lainnya sangat dianjurkan)



Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan *disinfectant*



Menghimbau para jama'ah shalat agar membawa sajadah atau sapu tangan/kain bersih sendiri sebagai alas sujud masing-masing



Meminta para jama'ah yang sedang batuk, demam, dan mengalami gejala sakit seperti flu/salesma agar melaksanakan shalat di rumah hingga sembuh



Ikut mengawasi penyebaran/penularan virus Corona (Covid-19) dan melakukan upaya tanggap/melaporkan jika ada warga masyarakat dicurigai terdampak virus Corona, khususnya di sekitar Masjid/Mushalla

KESIMPULAN

1. Perencanaan penanganan Covid 19 berdasarkan kebutuhan pelaksanaan penanganan Covid 19
2. Penanganan Covid 19 Membutuhkan Sinergi Antara Aspek Kesehatan Masyarakat Dan Clinical Management
3. Masyarakat Adalah Kunci Kekuatan Kesehatan Masyarakat
4. Pemberdayaan Masyarakat Menuju Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru Di Keluarga, Desa Dan Tempat Umum
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus menjadi budaya kehidupan masyarakat.
6. Masyarakat harus memahami dan melaksanakan protokol covid-19 secara efektif
7. Kunci Keberhasilannya : Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat

Arah Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dalam Pendokumentasian Pandemi COVID-19 secara Terpadu

DR. IR. SLAMET SOEDARSONO, MPP, QIA, CRMP, CGAP.
*Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Kementerian PPN/Bappenas*

*Disampaikan dalam Webinar Kearsipan Nasional "Mengubah Ancaman COVID-19 menjadi Peluang
dalam Mendukung Terwujudnya Penyelamatan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas dan Warisan
Dokumenter"*

Jakarta, 5 Agustus 2020



OUTLINE

01

Lingkungan Strategis Pembangunan Bidang Polhukhankam

02

Isu Strategis Pembangunan Aparatur Negara dan Aspek Kearsipan Ke Depan

03

Arsip di Masa Pandemi COVID-19

04

Kebijakan dan Output ANRI yang Mendukung Penanggulangan Pandemi COVID - 19





Lingkungan Strategis Pembangunan Bidang Polhukhankam



VISI-MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhanaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

7 AGENDA PEMBANGUNAN

- | | |
|--|---|
| | Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas |
| | Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan |
| | SDM Berkualitas dan Berdaya Saing |
| | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan |
| | Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar |
| | Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim |
| | Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |



LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL BIDANG POLHUKHANKAM DALAM RPJMN 2020 - 2024

Demokrasi Prosedural



Kualitas Reformasi
Birokrasi Tidak Merata



Potensi Ancaman terhadap
Kedaulatan Negara dan
Kejahatan Transnasional



- 1) Masih Adanya Perilaku Koruptif
- 2) Penegakan Hukum yang Belum Optimal



Sumber: Diolah Bappenas, 2019



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM DALAM RPJMN 2020-2024



**Konsolidasi
Demokrasi**

Sasaran PP I:
Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif



**Optimalnya
kebijakan luar
negeri**

Sasaran PP II:
Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional



**Penegakan
Hukum Nasional**

Sasaran PP III:
Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan



**Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola**

Sasaran PP IV:
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah



**Menjaga
Stabilitas
Keamanan
Nasional**

Sasaran PP V:
Terjaganya stabilitas keamanan nasional






KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS DALAM PN 7 RPJMN 2020-2024

Program Prioritas

Konsolidasi
Demokrasi





Kegiatan Prioritas

-  Penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
-  Penguatan kesetaraan dan kebebasan;
-  Peningkatan kualitas komunikasi publik.

Program Prioritas

Optimalisasi
Kebijakan Luar
Negeri





Kegiatan Prioritas

-  Optiomalisasi kepemimpinan Indonesia di Forum Regional dan Global;
-  Penguatan Kerjasama pembangunan internasional;
-  Peningkatan citra positif di dunia internasional;
-  Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.

Program Prioritas

Penegakan Hukum

Kegiatan Prioritas

-  Penataan regulasi;
-  Perbaiki sistem hukum pidana dan perdata;
-  Penguatan sistem anti korupsi;
-  Peningkatan akses terhadap keadilan.

Program Prioritas

Reformasi Birokrasi
dan Tata Kelola

Kegiatan Prioritas

-  Penguatan implementasi manajemen ASN;
-  Transformasi pelayanan publik;
-  Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
-  Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.

Program Prioritas

Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional

Kegiatan Prioritas

-  Penguatan keamanan dalam negeri;
-  Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM;
-  Penguatan keamanan laut;
-  Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
-  Penguatan ketahanan dan keamanan siber.

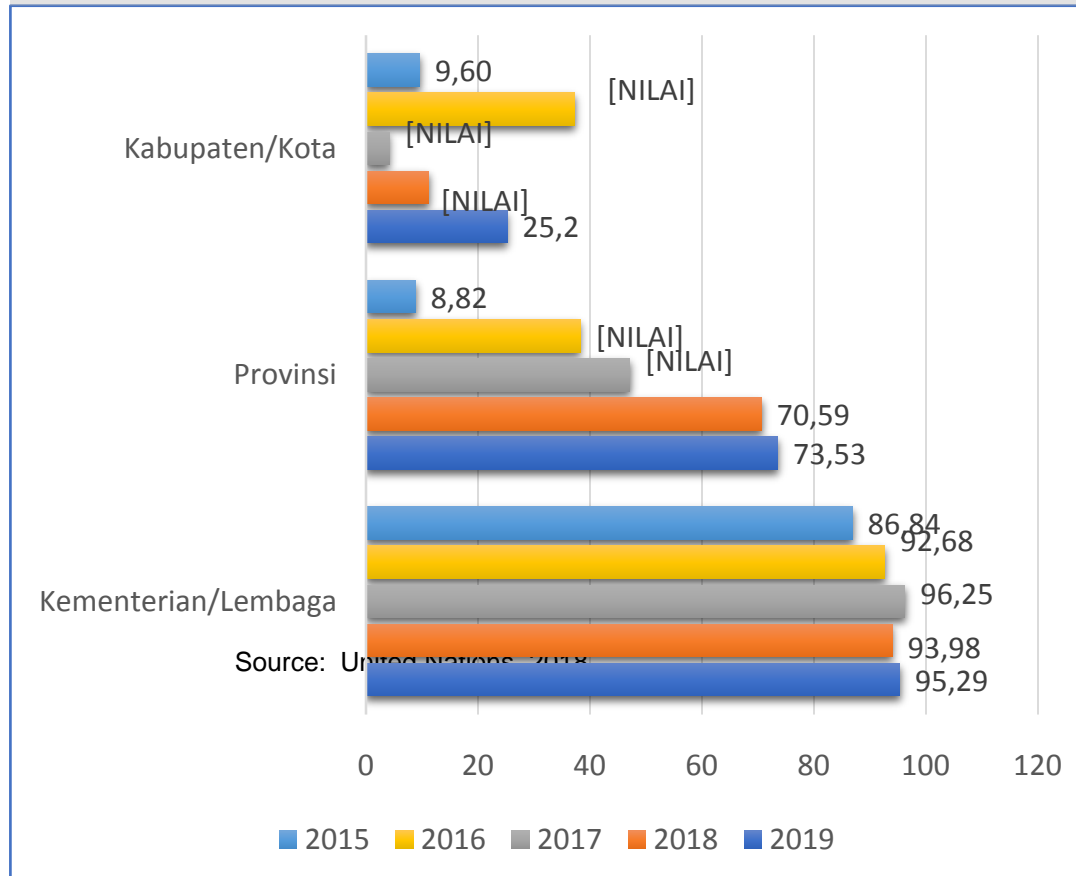


Isu Strategis Pembangunan Aparatur Negara dan Aspek Kearsipan Ke Depan

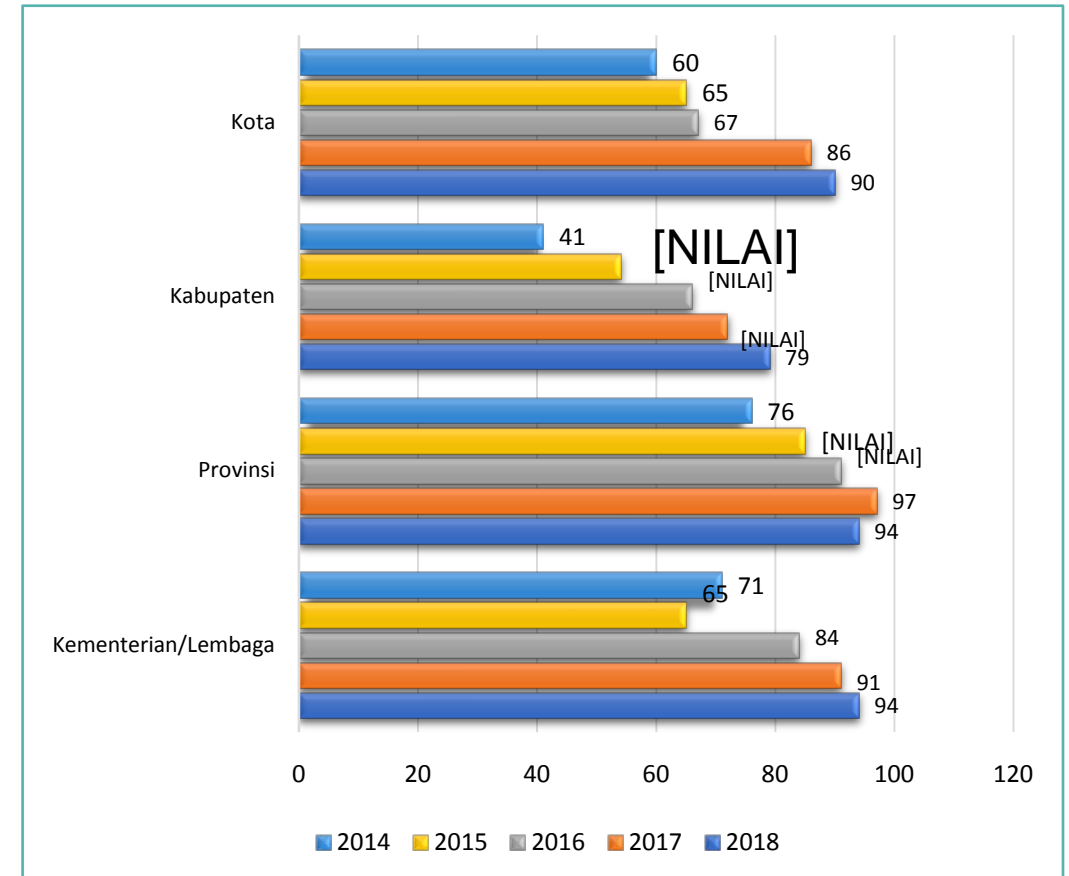


Lingkungan Strategis Pembangunan Bidang Aparatur

Indeks Reformasi Birokrasi K/L/Pemda dengan Skor \geq B (%)



Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L/Pemda (%)





Isu Strategis Pembangunan Aparatur Negara


PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola




Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral



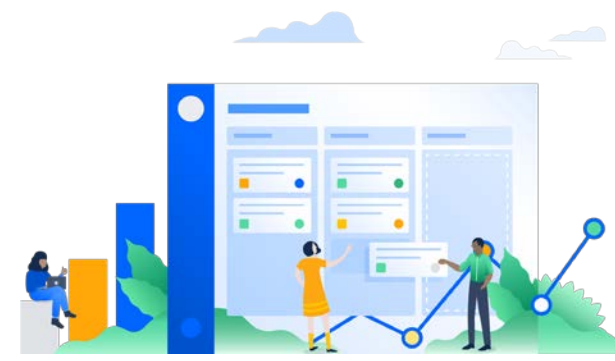
Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta public dalam pemerintahan



Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas



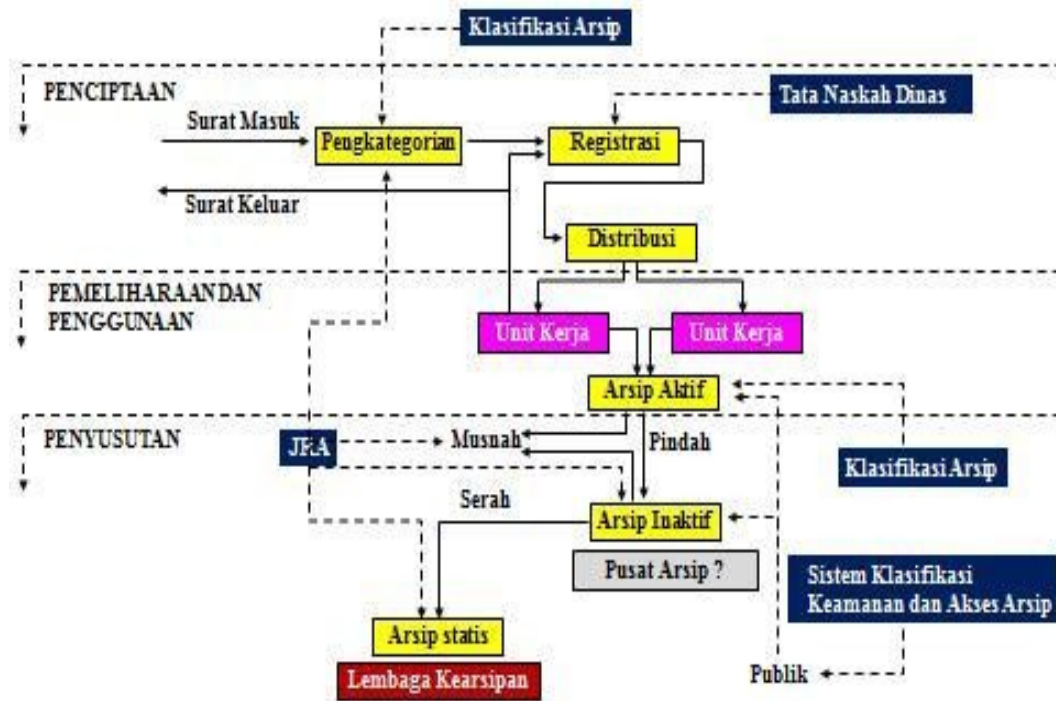
Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh



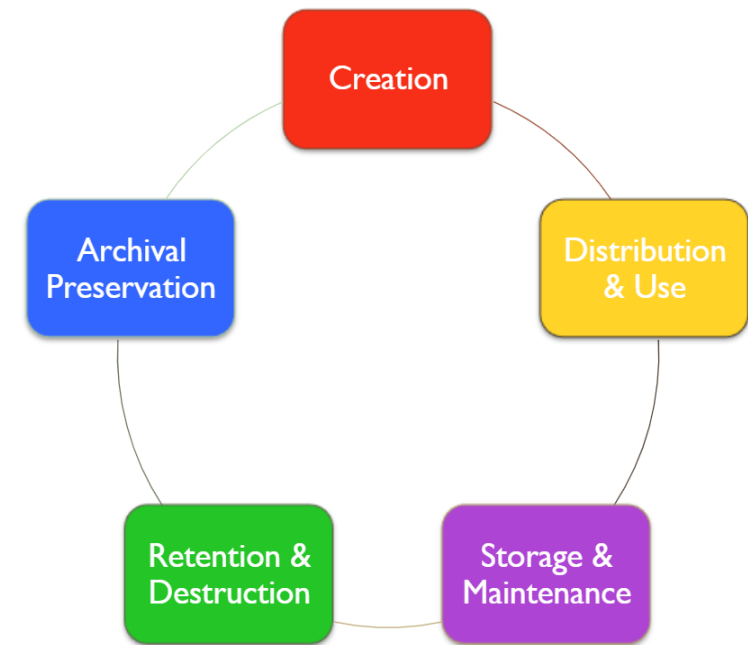


Kerangka Teori Kearsipan

PROSES PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS



Records Management Lifecycle



16

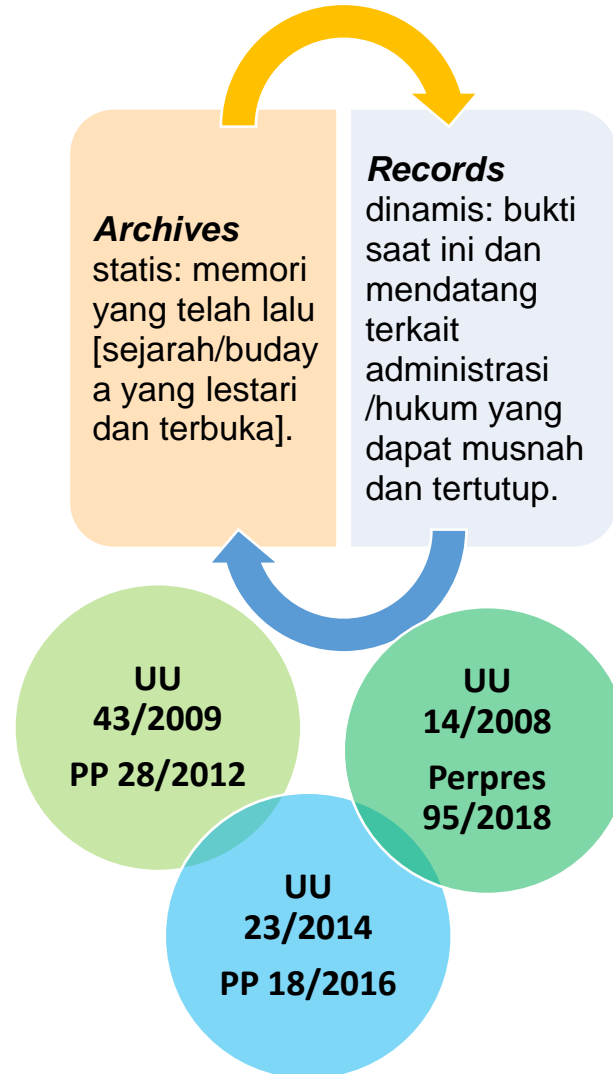
Sumber : Jurnal Kearsipan ANRI, 2018

Sumber: Dr. Patricia C. Franks, CRM, San Jose State University <http://slideplayer.com/slide/4447461/>



Peranan Arsip dalam Pemerintahan

- Identitas bangsa
- Jati diri bangsa
- Memori kolektif bangsa
- Nilai guna kesejarahan
- Simpul pemersatu bangsa



- Alat bukti sah
- Kepentingan negara
- Hak keperdataan rakyat
- Tulang punggung manajemen
- Bahan akuntabilitas
- Transparansi dan Reformasi Birokrasi



Tren Kearsipan ke Depan



Arsip sebagai pondasi akuntabilitas pemerintah sebagai bagian pengawasan dan alat pengambilan keputusan (*knowledge management*)



Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui E-Arsip Terintegrasi



TEKNOLOGI INFORMASI

e-Archive

e-OFFICE

Security

BIG DATA



Tantangan dalam Pengelolaan Arsip Elektronik



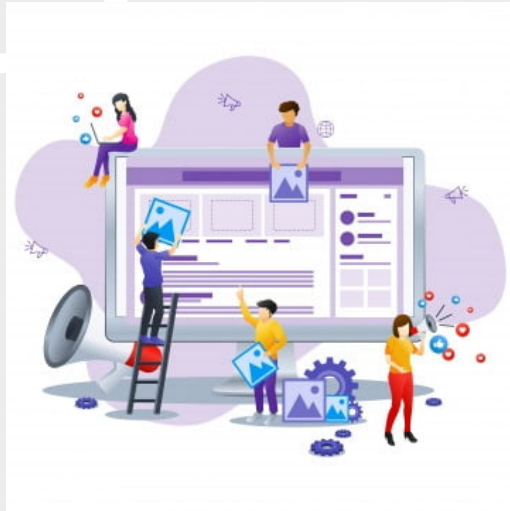
1
Cara menjaga dan mendeteksi keaslian dan keutuhan arsip elektronik

2
Keandalan teknologi dalam pengamanan arsip elektronik

3
Ketersediaan SDM arsiparis yang memiliki literasi digital

4
Penggunaan standar manajemen arsip elektronik

5
Pemanfaatan arsip sebagai bentuk akuntabilitas dan sumber khazanah kebudayaan



Arsip di Masa Pandemi COVID-19



ANTISIPASI PEMULIHAN PEMBANGUNAN NASIONAL PASCACOVID-19



Analisis Dampak



Pertumbuhan Ekonomi
-0,4% - 2,3%



Tingkat Pengangguran Terbuka
7,8–8,5%



Kunjungan Wisman
↓3 juta (US\$3,6-4,0)



Tingkat Kemiskinan
9,7% - 10,2%

Ekonomi global diperkirakan mengalami **proses transformasi** di empat area:



Struktur ekonomi dan digital



Perilaku dan pola hidup masyarakat



Pola rantai pasok



Tatanan internasional

Dalam kondisi tanggap darurat, di tahun 2020 pemerintah mempertajam realokasi anggaran [belanja pemerintah pusat dan transfer]

TAHAP 1

Penguatan Fasilitas Kesehatan

TAHAP 2

Melindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha

TAHAP 3

Mengurangi Tekanan Sektor Keuangan

TAHAP 4

Program Pemulihan Pasca Covid (RKP 2021)

Sedang dilakukan Pemerintah dan perlu terus dilakukan sampai tuntas penanganan Covid-19

Pemulihan pembangunan nasional

Pendokumentasian dan Pengarsipan Pandemi



Wabah Justinian
(Abad ke-5)

25-100 juta korban



Black Death
(Abad ke-14)

75-200 juta korban



Flu Spanyol
(1918-20)

17-50 juta korban



COVID-19
(Desember 2019)

17.8 juta kasus
(per 2 Agt 2020)

- Dengan ragam temporalitas sejarah masa lalu-sejarah masa kini-sejarah masa depan (*historical past-historical present-historical future*), kerja pengarsipan pandemi berlangsung secara **kontinu**, pada ruang waktu yang tidak terbatas;
- Diperlukan **kolaborasi** antara pekerja arsip dengan berbagai profesi lintas disiplin ilmu, termasuk masyarakat umum dalam dokumentasi COVID-19.

Perkembangan **budaya tulis dan cetak** dari masa ke masa serta pergeserannya ke **medium digital**, berpengaruh terhadap kerja dokumentasi dan pengarsipan utamanya terkait pandemi COVID-19 saat ini

Arsip dan *Evidence-Based Policy* di Masa Pandemi COVID-19



Frank M. Snowden. 2019. *Epidemics and Society: From the Black Death to the Present*. Connecticut: Yale University Press.

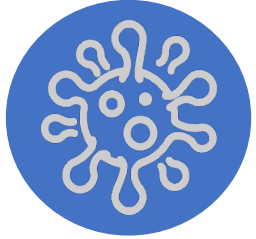
- Wabah penyakit memiliki **siklusnya pengulangannya** tersendiri, dan **selalu membawa perubahan drastis** terhadap peradaban (*civilization*), ritus keagamaan, pengobatan dan kesehatan, pengetahuan dan seni, serta teknologi;
- Tidak ada wilayah di belahan Bumi yang belum terjamah wabah; **kemampuan adaptasi terhadap perubahan** menjadi kunci;
- Asesmen dampak wabah terhadap aspek sosial, ekonomi, politik, kultural dan upaya penanganan serta pengurangan dampak wabah merupakan hal-hal penting sebagai **rujukan pembuatan kebijakan di masa depan**.



Pemanfaatan arsip perihal wabah dan penanganannya di masa lalu sebagai **sumber daya pengetahuan** menjadi penting dalam mendukung **perumusan kebijakan berbasis bukti** (*evidence-based policy*) utamanya terkait penanggulangan COVID-19.



Fokus Aspek Dokumentasi Pandemi COVID-19



Kemunculan virus
dan respons
penanganan



Informasi mengenai
penyebaran dan
jumlah penderita



Upaya yang dilakukan
Pemerintah Pusat dan
Daerah serta aktor lainnya



Aspek medis
penanganan
COVID-19



Aspek
ekonomi, politik, dan
administrasi



Aspek sosial-kultural
penanganan
COVID-19

penanganan COVID-19

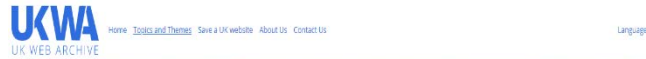
Joint Statement ICA and ICIC* on COVID-19
“Tugas pendokumentasian dan pengarsipan tidak berhenti di masa pandemi COVID-19, justru menjadi semakin penting”

- **Seluruh upaya pengambilan kebijakan pemerintah harus didokumentasikan** (*decisions must be documented*);
- **Catatan dan data harus diamankan dan dipreservasi di semua sektor** (*records and data should be secured and preserved in all sectors*);
- **Upaya pengamanan dan akses ke konten digital harus terus terfasilitasi** (*the security, preservation and access to digital content should be facilitated during the shutdown*).

*) International Council on Archives (ICA); International Conference of Information Commissioners (ICIC)



Praktik Pendokumentasian dan Pengarsipan Pandemi COVID-19



Pandemic Outbreaks

You are here: Topics and Themes / Pandemic Outbreaks

This collection of websites was initiated in 2005 to contingency plan around any possible outbreak of Avian flu in the UK. It has since been expanded to include all types of Pandemic flu, such as the Swine flu outbreak of 2009. The collection contains public advisory sites produced by the Government alongside news and commentary.

Search within "Pandemic Outbreaks"

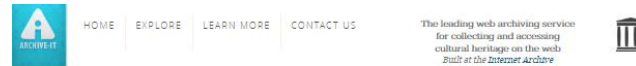
2087 sites in collection

Activate Windows
Go to Settings to activate Wi

1 2 3 4 5 Next >

Inisiatif Pandemic Outbreaks (UK Web Archive)

Dikembangkan sejak 2005 guna mendokumentasikan situs dan media sosial yang memuat berita terkait Flu Burung (*Avian Flu*) di Inggris, yang diteruskan hingga kini melalui dokumentasi COVID-19. Memuat 2.087 koleksi laman.



Explore >> National Library of Medicine >> Global Health Events web archive



Global Health Events web archive

Collected by: National Library of Medicine

Archived since: Oct. 2014

Description: A selective collection of over 200 websites archived by the National Library of Medicine beginning in 2014 related to global health events, including the 2014 and 2016 Ebola outbreaks, Zika virus disease in 2014-2016, and the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Included in the archive are websites and social media of government and non-government organizations, journalists, healthcare workers, and scientists in the United States and around the world, with an aim to collect and preserve a diversity of perspectives. Archived websites are primarily in English. NLM will continue to develop, review, describe, and add content to the collection.

Subject: Government > National Science & Health, Spontaneous Events, Ebola, hemorrhagic fever, Ebola virus disease, Zika Virus, Zika Virus Infection, Coronavirus Disease (COVID-19)

Group: Thematic and Event-Based Collections

Collector: National Library of Medicine (US)

Narrow Your Results

Sites for this collection are listed below. Narrow your results at left, or enter a search query below to find a site specific URL or to search the text of archived webpages.

Type Set By: Count | (4,2)

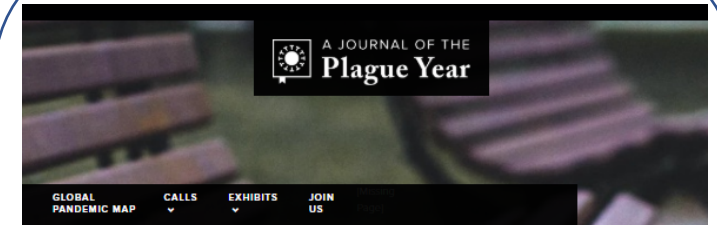
Website (411)
News article (394)
Press release (78)

Enter search terms here

websiteGroup: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak

Global Health Events Web Archives (US National Library of Medicine)

Dikembangkan sejak 2014 dan telah mendokumentasikan situs serta media sosial yang memberitakan pelbagai krisis kesehatan mulai wabah Ebola, Zika, sampai COVID-19. Memuat 2.522 koleksi laman.



Share Your Story

Please share your story about the impact of Covid-19 by filling out this page. (Haz clic acá para español) We accept all sorts of materials into the digital archive, including textual stories and digital objects—images, video, tweets, Facebook posts, Instagram or Snapchat memes, PDFs, screenshots of the news and emails. We accept anything that describes the pandemic and speaks to paradoxes of the moment. Imagine, as we are, what future historians might need to write about and understand this historical moment.

The best stories speak personally about a moment or to reflect your thoughts on the images or audio files that you're sharing.

Journal of the Plague Year (Arizona State University)

Pengembangan arsip digital COVID-19 melalui metode *participatory archiving*, dimana tiap orang dapat mengunggah berita, catatan, kisah, dan obyek digital (foto, video, *post* Facebook, Twitter, *meme*) untuk dikurasi serta dipreservasi.

1) Oya Y. Rieger, *Documenting the COVID-19 Pandemic*, Ithaka S+R (<https://sr.ithaka.org/blog/documenting-the-covid-19-pandemic/>), 06/04/2020

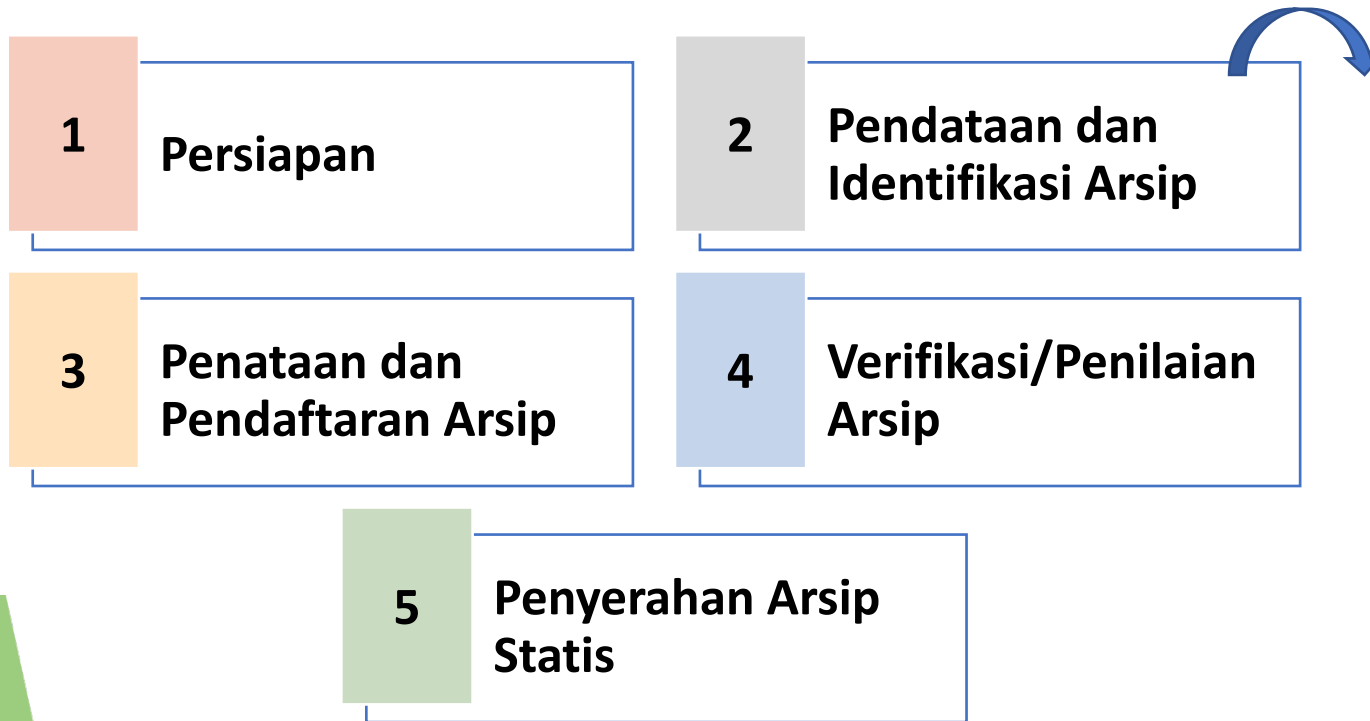
2) Eddie Woodward, *Participatory Archiving: The Next Generation in Archival Methodology*, College & Research Library News (<https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/9535/10858>), 2016



Langkah-Langkah Pengelolaan Arsip Masa Pandemi COVID-19

Mendukung Akuntabilitas Kinerja

SE Menteri PAN RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip dan Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Kriteria Arsip:

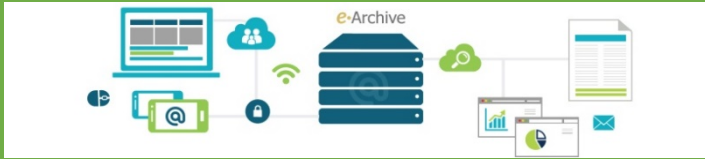
1. Tercipta dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan COVID-19;
2. Tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
3. Pengerahan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
4. Tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan COVID-19.



Kebijakan dan Output ANRI yang Mendukung Penanggulangan Pandemi COVID-19



Kebijakan dan Output ANRI dalam Mendukung Pencegahan Penyebaran COVID-19



SPBE mendukung kinerja birokrasi pemerintah

Penerapan PSBB dengan pelaksanaan WFH berpengaruh pada kinerja dan akuntabilitas kinerja. Pentingnya integrasinya data dan layanan SPBE.

Pengembangan E-Arsip dan *Big Data* Kearsipan

Integrasi e-arsip dan pengembangan *Big Data* Kearsipan dalam tata kelola administrasi pemerintahan yang efisien, dan penyiapan fondasi manajemen pengetahuan, termasuk penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik.

Pengawasan kearsipan di K/L/D secara *online*

Perubahan metode verifikasi langsung menjadi verifikasi *online (upload file)* dan pertemuan via *video conference* yang didukung oleh infrastruktur IT .



**Kementerian PPN/
Bappenas**

Terima Kasih

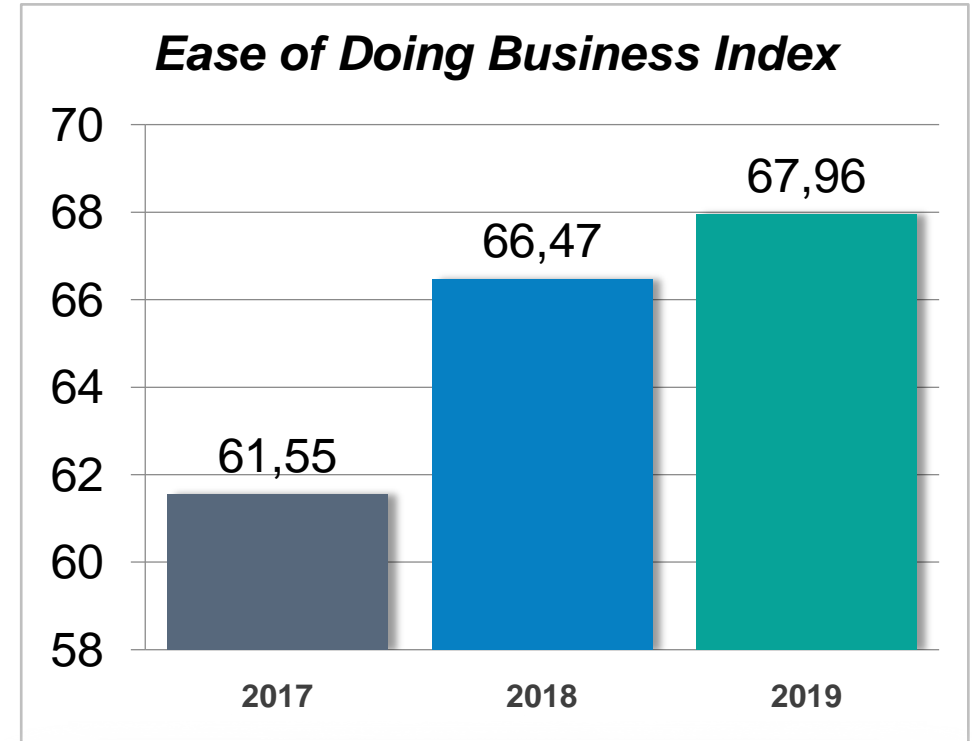
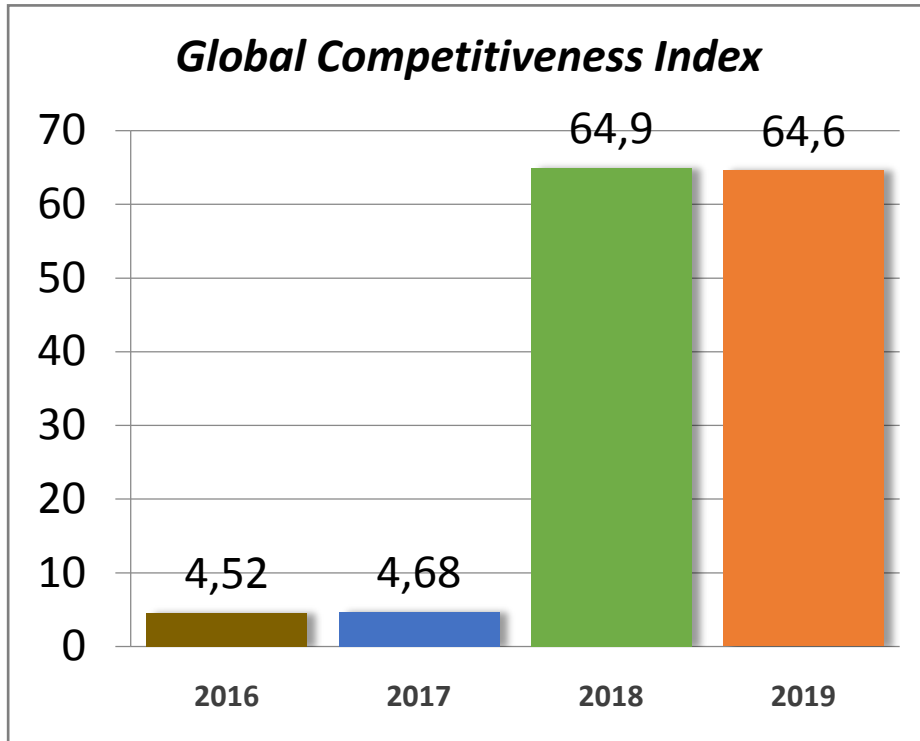


Lampiran



LINGKUNGAN STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR

- **Governance Performance Issues (1)**



Skor kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan dari 66,47 [2018] menjadi 67,96 [2019]. Namun GCI Indonesia mengalami penurunan dari peringkat ke-45 [2018] menjadi peringkat ke-50 dari 141 negara yang di ranking [2019].

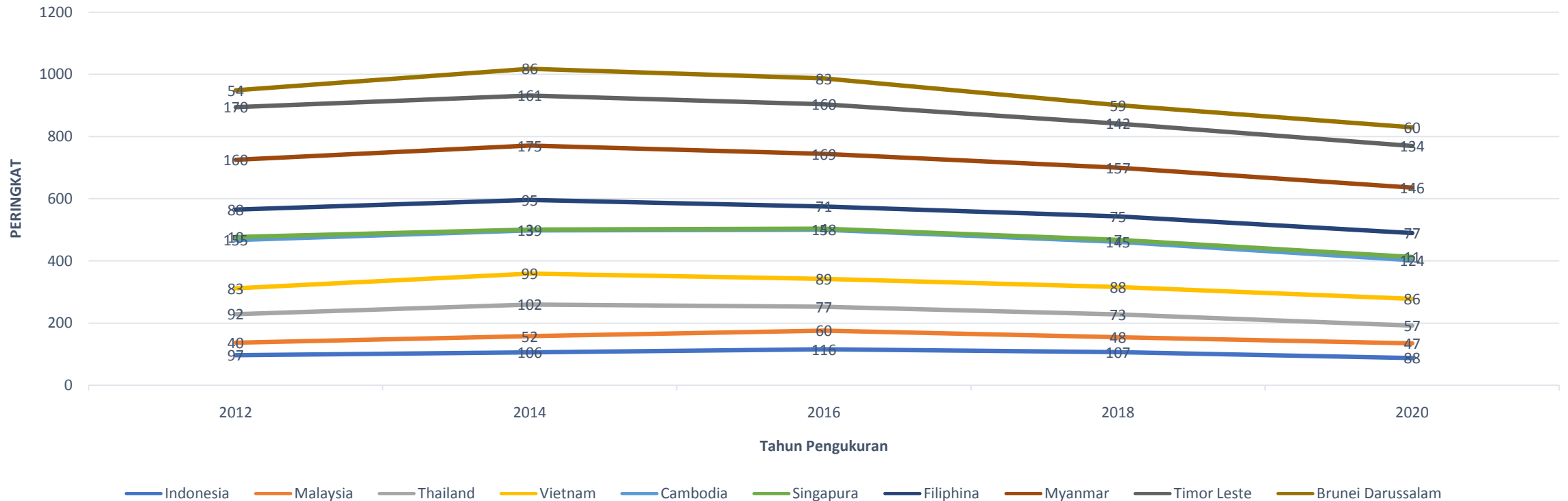


LINGKUNGAN STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR



E- Government Development Index

Governance Performance Issues (2)



Peringkat EGD I Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan [19 tingkat] dari ranking ke-107 [2018] menjadi ranking ke-88 [2020]. Di tingkat ASEAN, skor Indonesia 0,6245, artinya masih berada di bawah rerata skor negara ASEAN [0,66245].



Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

TEMA RKP 2021

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2021



Percepatan Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi



Reformasi Sistem Kesehatan Nasional



Reformasi Sistem Perlindungan Sosial



Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

MAJOR PROJECT YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi

- **MP Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas**
- **MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas**
- **MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter**
- **MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**
- **MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

- **MP - Penguatan Sistem Kesehatan Nasional *)**

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

- **MP - Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh *)**

Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

- **MP - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana**

**) merupakan Major Project baru yang diusulkan untuk tahun 2021*

**) memerlukan arahan Presiden perihal transformasi subsidi LPG dan Listrik menjadi Bantuan Sosial pada tahun 2021*

PRIORITAS NASIONAL (PN)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PN 1

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 3

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 4

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN 5

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 6

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN 7



Mengubah Ancaman COVID-19 Menjadi Peluang Besar Warisan Dokumenter

*“UNESCO, through the Memory of the World (MoW) Programme, stands ready to support all Member States who wish to **preserve official records related to COVID-19** within the framework of the UNESCO”*



Memperkuat kerja sama nasional dan internasional dalam pelestarian dan aksesibilitas warisan dokumenter



Meningkatkan investasi dalam pelestarian dan aksesibilitas warisan dokumenter sebagai bagian dari upaya **pengurangan risiko dan manajemen bencana**



Mempermudah akses para peneliti, pembuat kebijakan, profesional media, ilmuwan dan masyarakat luas untuk memahami bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap keadaan darurat kesehatan di masa lalu sehingga dapat menginformasikan para pembuat kebijakan saat ini

Sumber: UNESCO, 2020



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

DUKUNGAN DAN SKEMA ANGGARAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID - 19

Dr. Purwanto, SE, M.Sc

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan

Webinar Kearsipan Nasional

Rabu, 5 Agustus 2020

OUTLINE



Pandemi Covid-19 dan Dampaknya di Indonesia



Respon Kebijakan Pemerintah



Arah Kebijakan Ekonomi & Fiskal 2020-2021



Perkembangan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)





PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA DI INDONESIA

PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA: TOTAL KASUS MENINGKAT



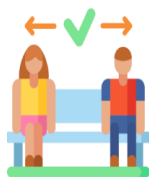
Jumlah kasus pasien aktif dan meninggal semakin meningkat



3 Juli 2020

60.695

TOTAL KASUS

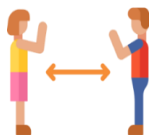


113.134
(86,40%)



3.036

MENINGGAL



5.302
(74,64%)



27.568

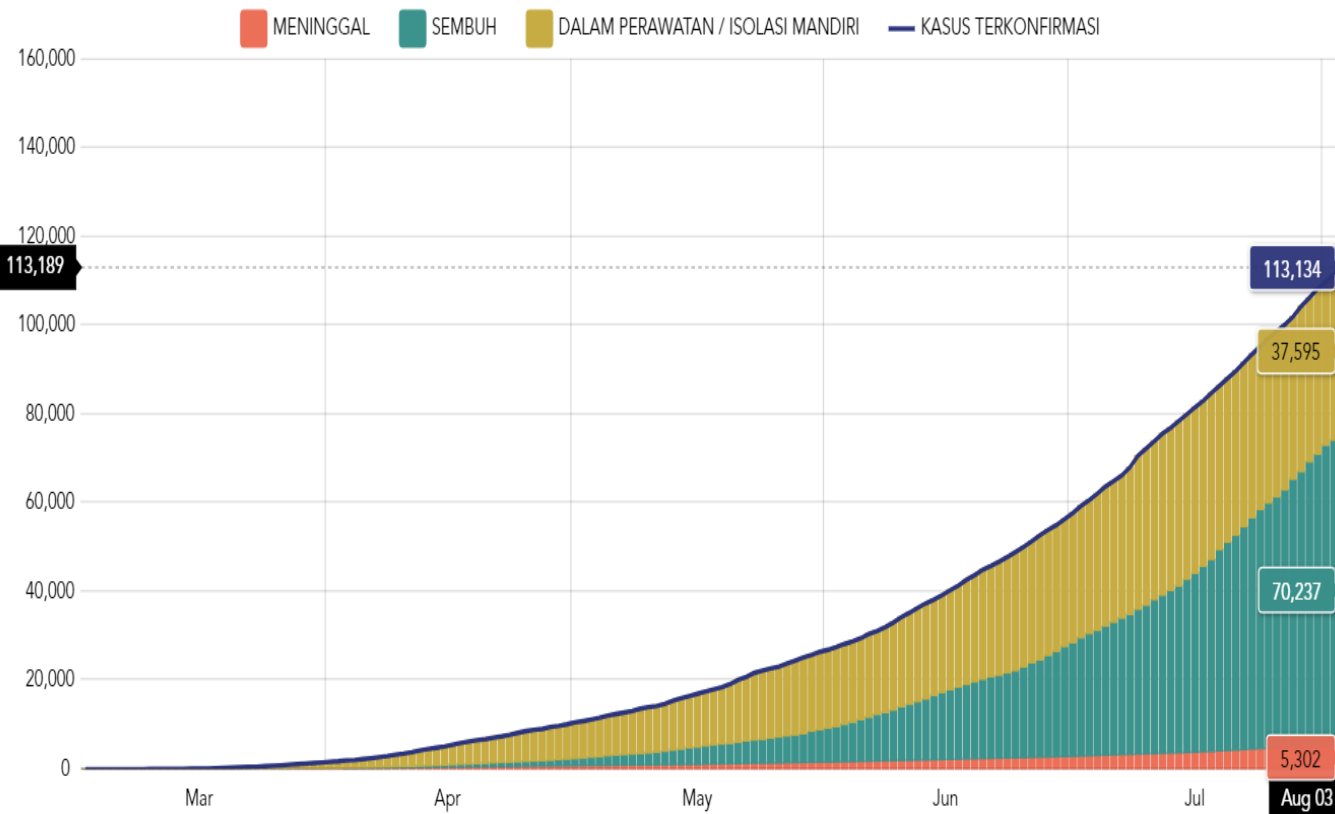
SEMBUH



70.237
(153,95%)



Perkembangan kasus per-hari
(Meninggal, Sembuh, dan Kasus terkonfirmasi)



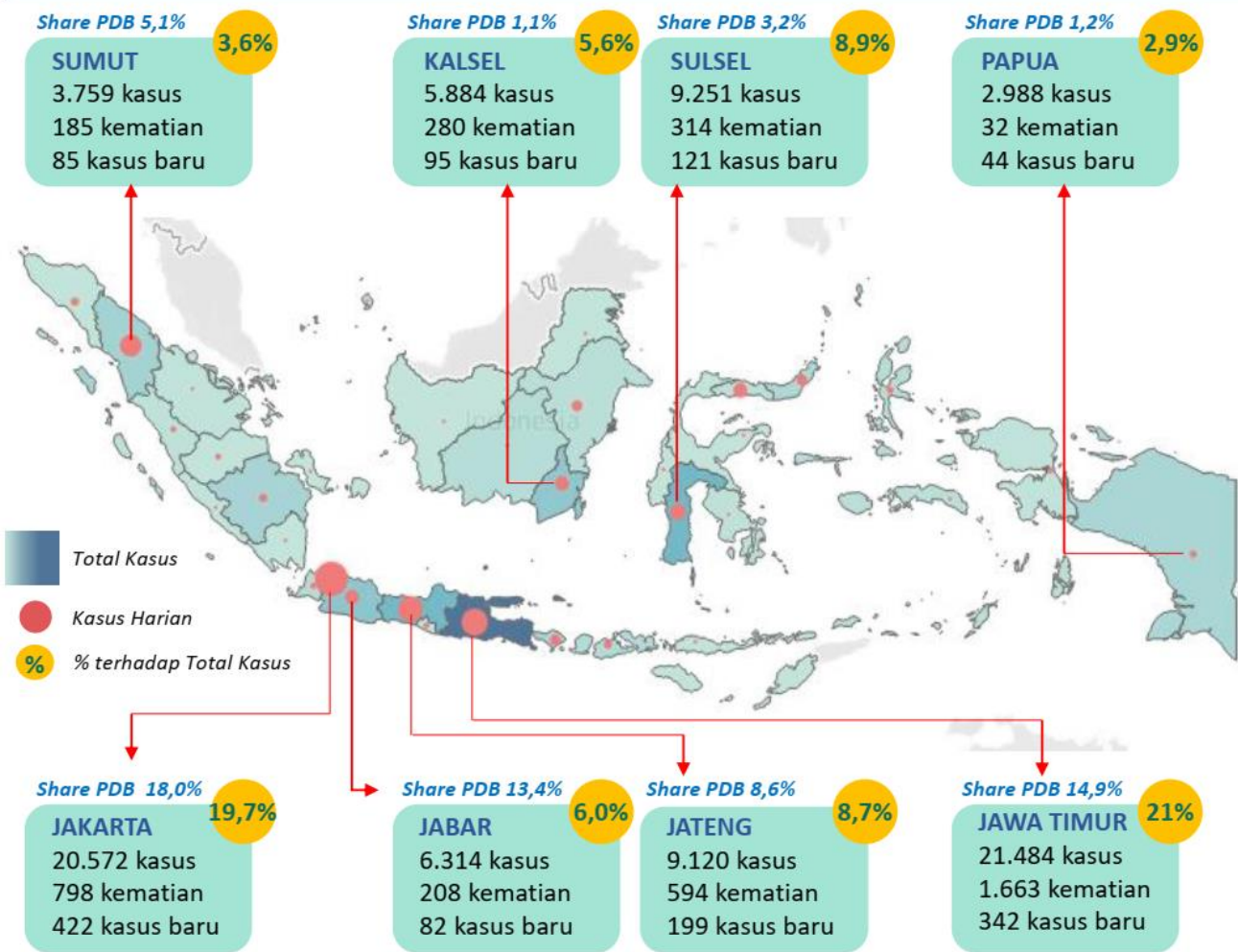
Sumber: covid19.go.id, 4 Agustus 2020

- Prosentase total kasus pada 3 Agustus 2020 meningkat 86,40% dibanding bulan sebelumnya
- Kasus meninggal juga meningkat menjadi 5.302 orang (74,64%) pada 3 Agustus 2020 dibanding dengan bulan sebelumnya
- Kasus sembuh pada 3 Agustus 2020 meningkat menjadi 70.237 orang (153,95%) dibanding bulan sebelumnya

Episenter Covid-19 Bergeser



Presiden menginstruksikan agar penyebaran Covid-19 khususnya di 8 wilayah dikendalikan



Beberapa Provinsi Lain dengan Kasus Covid-19 di atas 1000

| Provinsi | Share PDB | Total Kasus (% thd Total) | Total Kematian | Kasus baru (rata-rata 7 hari) * |
|-------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| Sumatera Selatan | 2,9% | 3.330 (3,2%) | 155 | 26 |
| Bali | 1,6% | 3.310 (3,2%) | 48 | 54 |
| Sulawesi Utara | 0,8% | 2.415 (2,3%) | 126 | 48 |
| NTB | 0,8 | 1.986 (1,9%) | 108 | 28 |
| Banten | 4,2% | 1.772 (1,7%) | 87 | 11 |
| Kalimantan Tengah | 1,0% | 1.677 (1,6%) | 88 | 33 |
| Maluku Utara | 0,3% | 1.524 (1,5%) | 46 | 27 |
| Kalimantan Timur | 4,14% | 1.307 (1,3%) | 27 | 45 |
| Maluku | 0,29% | 1.069 (1,0%) | 22 | 10 |

* Jumlah kasus baru menggunakan rata-rata 7 hari

Kondisi Luar Biasa Covid-19 Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Q1 Tahun 2020



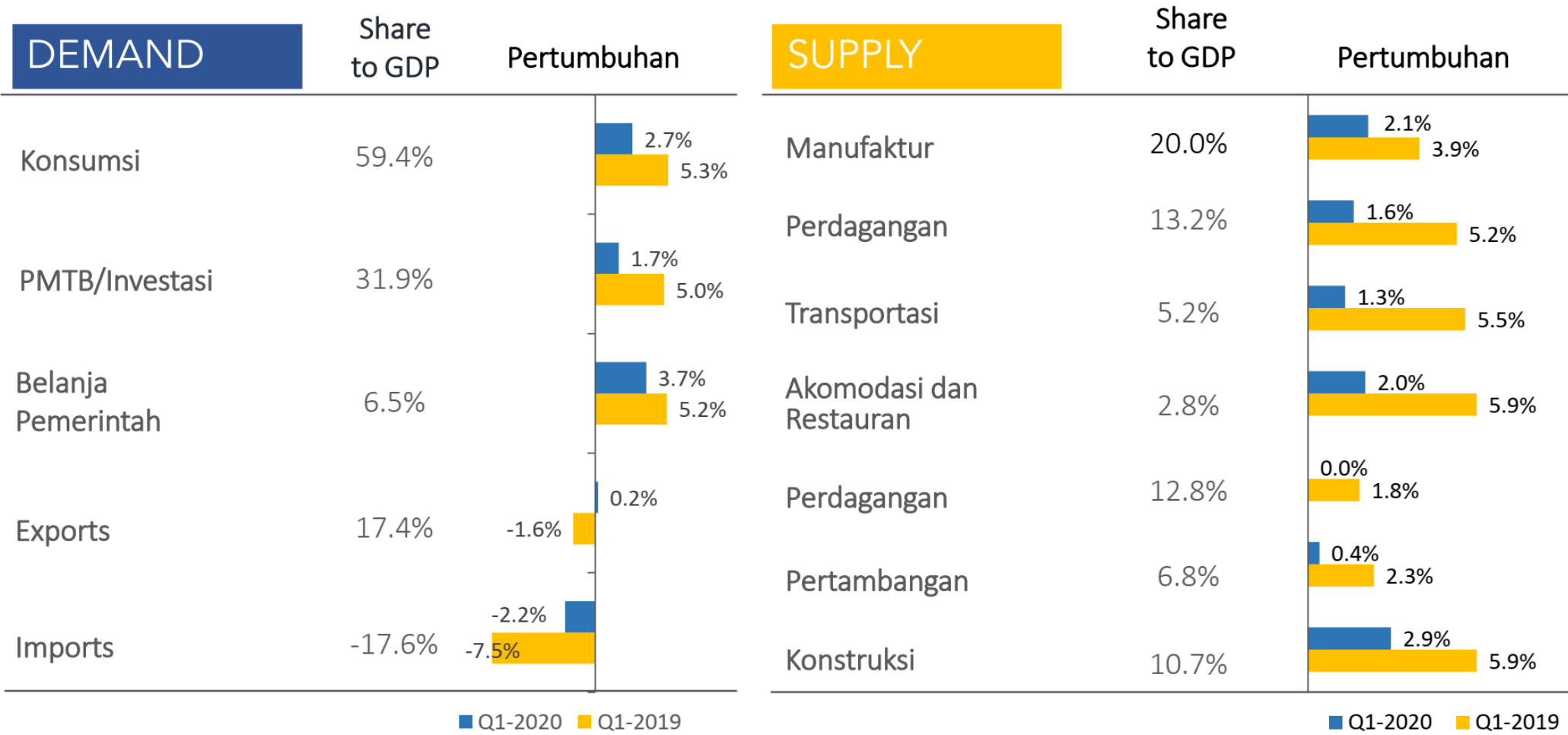
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2020 melambat pada tingkat 2,97% (YoY)

2.97%

Pertumbuhan Ekonomi Q1 2020

(yoy)

- COVID-19 dimulai pada awal Maret, di Indonesia
- Namun dampaknya cukup besar di Q1
- Q2 akan menjadi titik terendah
- Q3 diprediksi sebagai tahap awal pemulihan ekonomi, karena relaksasi PSBB secara bertahap



Sumber: BPS

Proyeksi Berbagai Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2021



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, update Juni (dalam %, yoy)

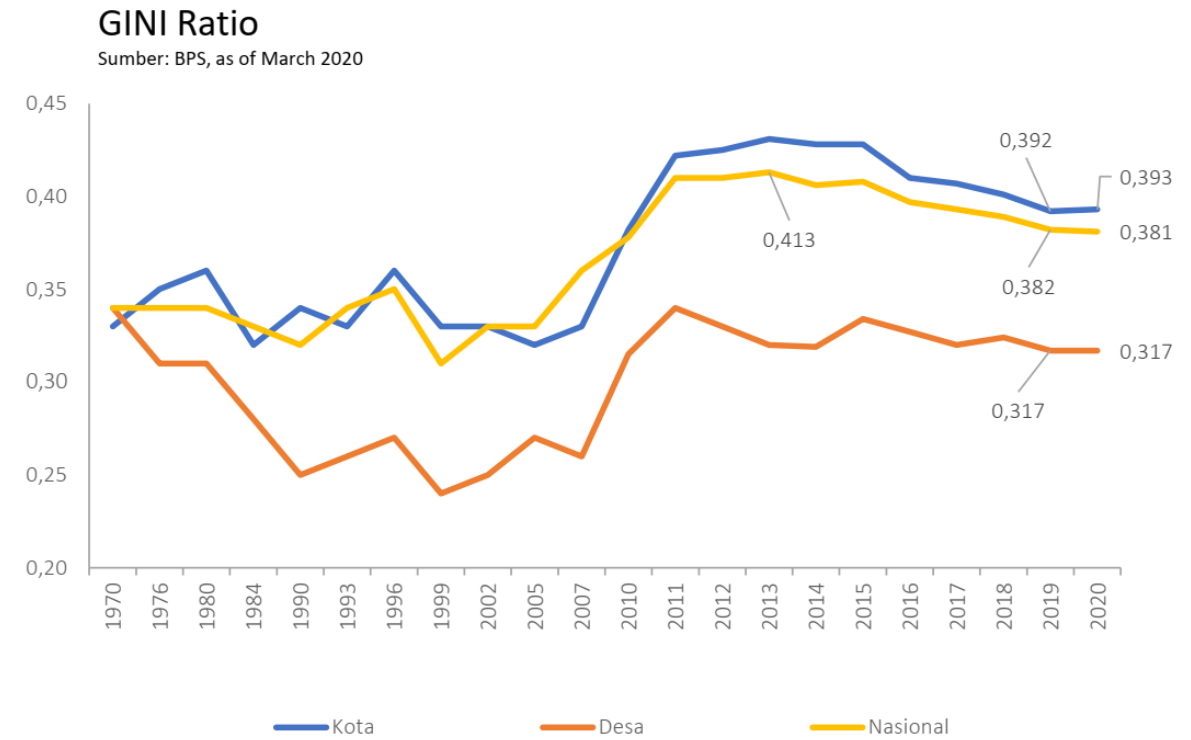
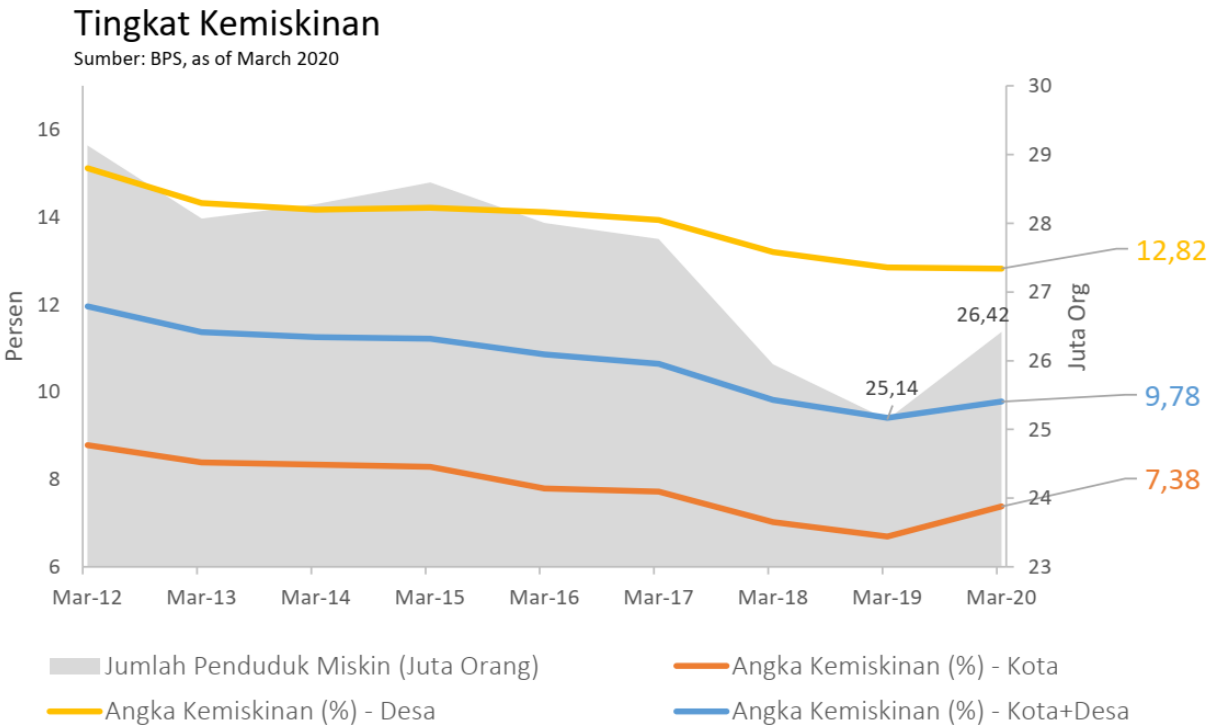
| | Kemenkeu | IMF | World Bank | OECD | ADB | Bloomberg (Median) |
|------|--------------|------|------------|---------------|------|--------------------|
| 2020 | -0,4 s.d 1,0 | -0,3 | 0,0 | -3,9 s.d -2,8 | -1,0 | 0,5 |
| 2021 | 4,5 s.d 5,5 | 6,1 | 4,8 | 2,6 s.d. 5,2 | 5,3 | 5,5 |

Sumber: WB Global Economic Prospect 2020, OECD Economic Outlook 2020, Asian Development Outlook 2020, World Economic Outlook IMF, Bloomberg (diolah)

Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 Meningkat Akibat Covid-19



Kebijakan perluasan belanja sosial bagian dari PEN diharapkan dapat menahan keberlanjutan pemburukan kemiskinan di Indonesia



- Tingkat kemiskinan meningkat, terutama di Jawa yang meningkat 0,37 basis poin atau setara dengan 1,28 juta orang miskin baru (atau 1,63 juta orang dibandingkan angka September)
- Akibatnya, rasio GINI meningkat
- Pemerintah telah mengimplementasikan paket bantuan, yang mana bagiannya adalah perluasan program jaring pengaman sosial
- Program ini mencakup bantuan tunai untuk orang miskin, subsidi makanan, kartu pra-kerja, dan potongan tagihan listrik

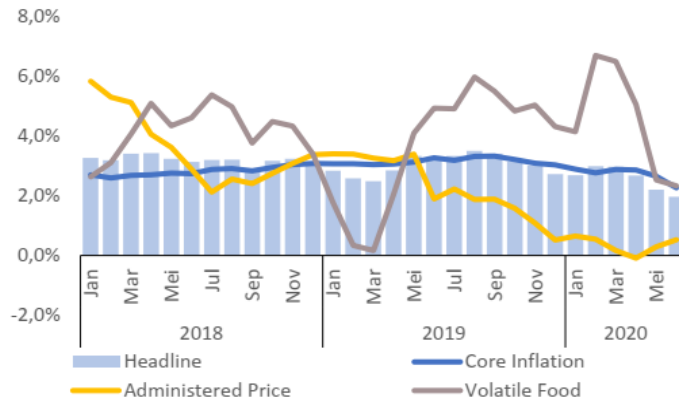
Dampak Covid-19 Tercermin dalam Perekonomian, **namun** Sinyal Perbaikan Aktivitas Mulai Terlihat



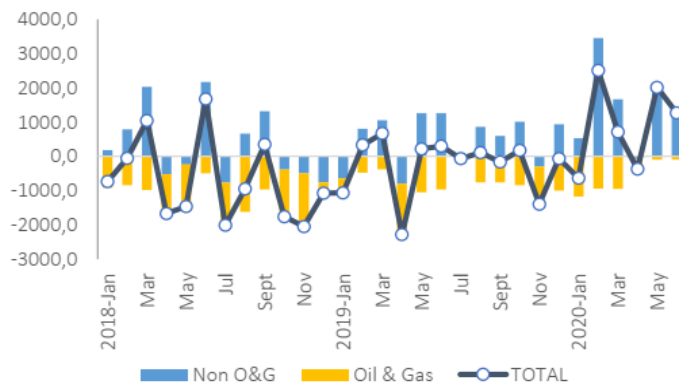
Indikasi pemulihan terutama terlihat di sektor riil, sektor finansial, serta tercermin dalam beberapa pos penerimaan perpajakan



Komponen Inflasi (yoy)

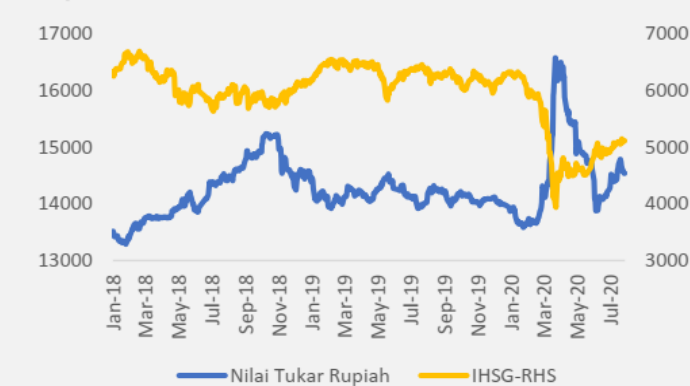


Neraca Perdagangan

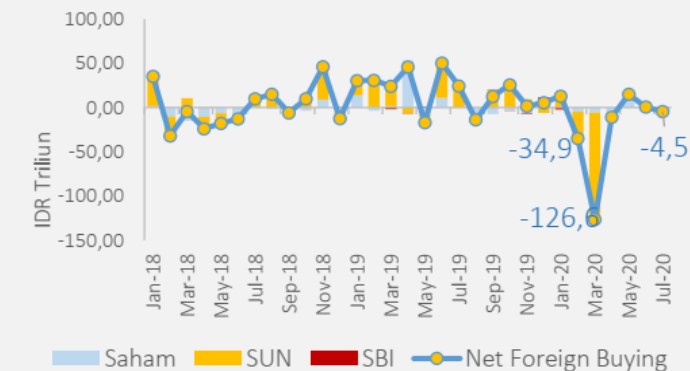


Inflasi yang terkendali turut mendukung stabilitas makroekonomi di tengah pandemi. Selain itu, neraca perdagangan juga mulai menunjukkan perbaikan didorong oleh kinerja positif ekspor nonmigas.

Pergerakan Nilai Tukar dan IHSG

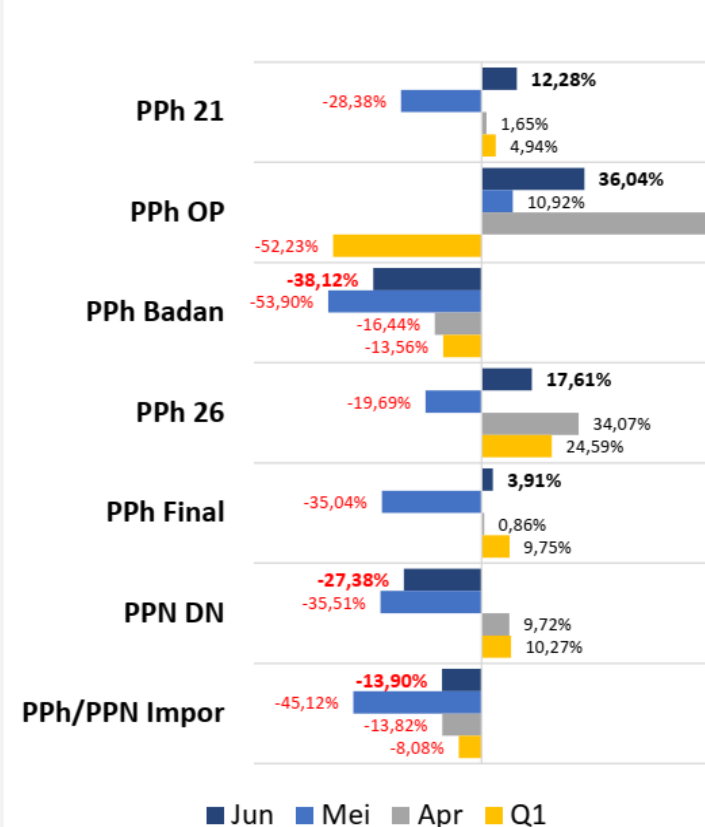


Arus Modal Masuk (Portofolio)



Dampak sentimen negatif dari COVID-19 mulai mereda antara lain ditunjukkan oleh pergerakan nilai tukar dan IHSG. Tekanan arus modal keluar juga berkurang.

Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan (yoy)



Beberapa jenis perpajakan mencatatkan pertumbuhan realisasi yang positif di bulan Juni. Transisi PSBB turut berkontribusi pada meredanya tekanan di sisi penerimaan perpajakan



RESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH



Langkah Cepat & Luar Biasa Penanganan Covid-19 serta Dampaknya melalui Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020



LATAR BELAKANG

- ❖ Pandemi COVID-19 memicu **krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi**
- ❖ Pandemi COVID-19- 19 menciptakan **kondisi kegentingan yang memaksa**
- ❖ Pemerintah perlu mengambil **langkah cepat & luar biasa (extraordinary)**

QUICK RESPONSES

Penerbitan **PERPPU No. 1/2020**

sebagai payung hukum untuk mengambil langkah- langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi COVID-19.

Saat ini, PERPPU tersebut telah disahkan menjadi
UU No. 2/2020

BEBERAPA KEBIJAKAN DALAM PERPPU

Kebijakan Keuangan Negara

- Penyesuaian **batasan defisit APBN**
- Penggunaan **sumber pendanaan alternative** anggaran
- Penyesuaian **mandatory spending**, pergeseran dan **refocusing** anggaran pusat dan daerah
- Program **penerbitan SBN** dan pinjaman dalam rangka **pembiayaan tambahan defisit**
- **Insentif** dan fasilitas perpajakan
- Pelaksanaan **Program Pemulihan Ekonomi Nasional** untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Kebijakan Sektor Keuangan

- **Perluasan kewenangan KSSK** dan ruang lingkup rapat KSSK
- Penguatan kewenangan BI, termasuk **membeli SBN jangka panjang pasar perdana**
- **Penguatan kewenangan OJK dan LPS** untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan
- **Penguatan kewenangan Pemerintah** dalam menangani permasalahan perbankan dan **stabilitas sistem keuangan**

Perubahan Postur APBN (Perpres 72 Tahun 2020)



Untuk menampung biaya penanganan COVID-19.



| | APBN 2020 (Dalam Triliun Rupiah) | APBN (Awal) | Perpres 54/2020 | Perpres 72/2020 |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| A. PENDAPATAN NEGARA | | 2.233,2 | 1.760,9 | 1.699,9 |
| 1. Perpajakan | | 1.865,7 | 1.462,6 | 1.404,5 |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | | 367,0 | 297,8 | 294,1 |
| 3. Penerimaan Hibah | | 0,5 | 0,5 | 1,3 |
| B. BELANJA NEGARA | | 2.540,4 | 2.613,8 | 2.739,2 |
| I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT | | 1.683,5 | 1.851,1 | 1.975,2 |
| 1. Belanja K/L | | 909,6 | 836,5 | 836,4 |
| 2. Belanja Non-K/L | | 773,9 | 1.014,6 | 1.138,9 |
| II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD) | | 856,9 | 762,7 | 763,9 |
| C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN | | (307,2) | (852,9) | (1.039,2) |
| <i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i> | | <i>(1,76)</i> | <i>(5,07)</i> | <i>(6,34)</i> |
| D. PEMBIAYAAN ANGGARAN | | 307,2 | 852,9 | 1.039,2 |

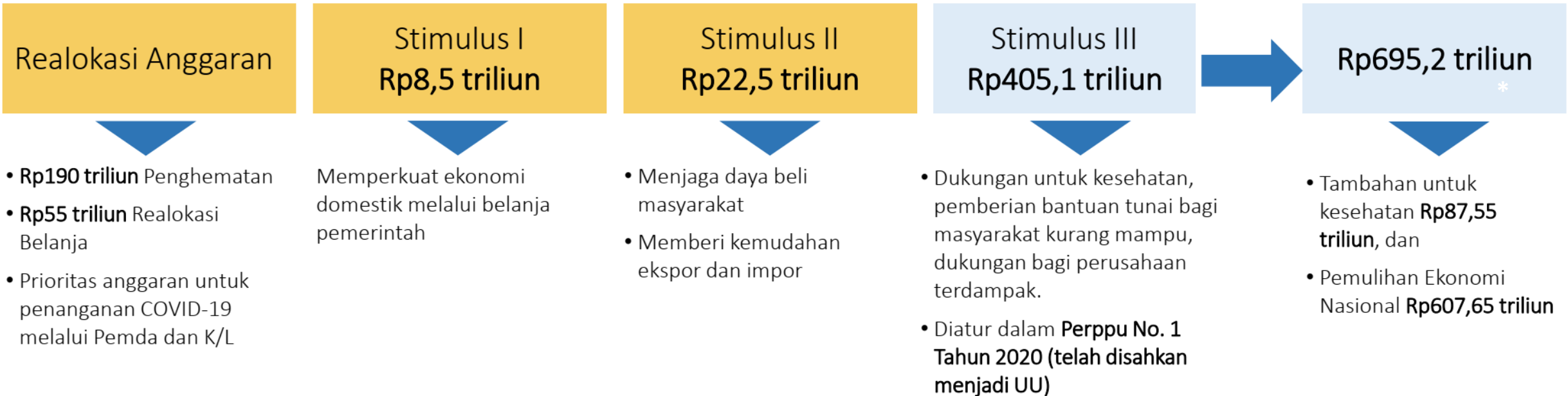
Mengoptimalkan Bauran Kebijakan untuk Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia



Respon pemerintah dalam memberikan stimulus sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktunya.



Biaya penanganan COVID-19 menjadi



KEBIJAKAN MONETER & KEUANGAN

MONETER

- Menurunkan tingkat suku bunga acuan BI
- Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM), baik untuk Rupiah maupun mata uang asing
- Memperpanjang tenor Surat Berharga Negara (SBN)
- Menyediakan uang higienis

KEUANGAN

- Pelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM
- Memberikan keringanan pembayaran kredit bagi UMKM

Biaya Penanganan COVID-19

Untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, dan Pemda.



Koordinasi Pemerintah & BI dalam Kebijakan Burden Sharing



Mendorong keberlangsungan fiskal yang sehat dan kepastian pendanaan PEN dalam masa pandemic.



| | Public Goods | Non-Public Goods | Belanja Lainnya |
|--------------------|--|---|---|
| Alokasi | kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L, Pemda Kebutuhan: IDR 397,56 trillion | UMKM, Korporasi non UMKM Kebutuhan: IDR 177,03 trillion | Tax incentives, other non-public goods expenditure Kebutuhan: IDR 328,87 trillion |
| Instrumen | Pemerintah menerbitkan SBN kepada Bank Indonesia secara private placement | Pemerintah melakukan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar dengan Bank Indonesia sebagai standby buyer sesuai SKB pertama tanggal 16 April 2020. | Pemerintah melakukan penerbitan SBN melalui mekanisme pasar dengan Bank Indonesia sebagai standby buyer sesuai SKB pertama tanggal 16 April 2020. |
| Coupon Rate | <ul style="list-style-type: none"> Suku bunga acuan BI reverse repo rate Bunga seluruhnya ditanggung oleh Bank Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah menanggung bunga sebesar BI reverse repo rate dikurangi 1% Sisanya ditanggung oleh Bank Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> Market coupon rate Seluruh bunga ditanggung Pemerintah |
| Penjelasan | <ul style="list-style-type: none"> Semua instrument pembiayaan bersifat tradeable dan marketable Berlaku one-off hanya untuk belanja tahun anggaran 2020 | | |

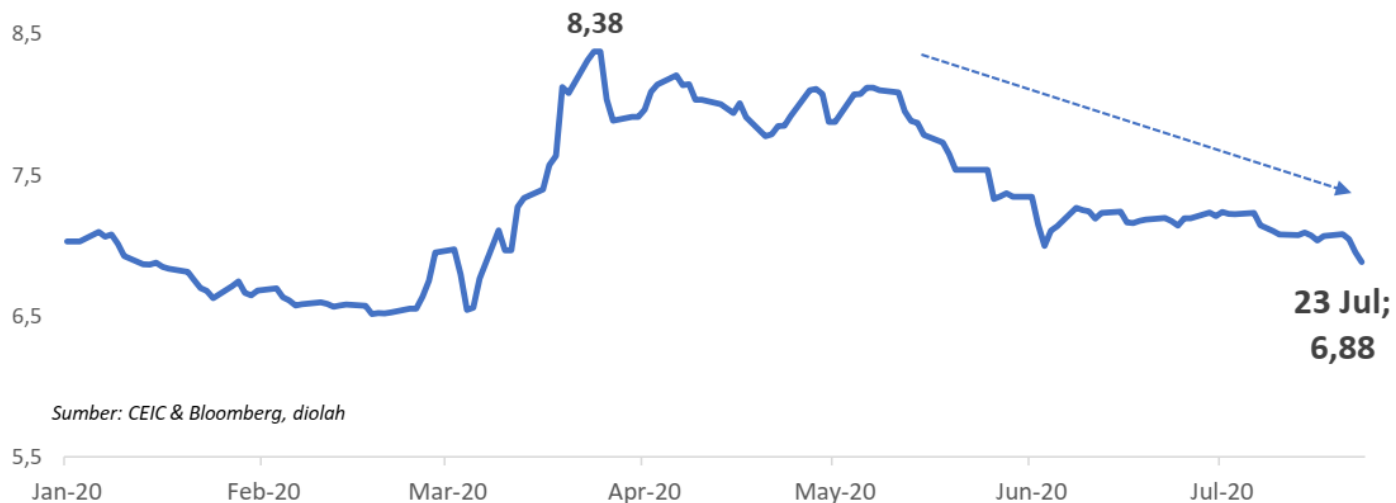
Koordinasi Kebijakan Fiskal-Moneter yang Baik Turut Memberi Sentimen Positif di Pasar Keuangan Domestik



Aliran Modal Masuk/Keluar 2020 (Rp Triliun)

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Kumulatif Jan- 21 Jul |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------------------|
| Saham | 0,0 | -4,8 | -5,6 | -8,8 | 8,0 | -4,5 | -1,5 | -17,2 |
| SBN | 15,2 | -28,9 | -121,3 | -2,1 | 7,1 | 5,2 | 1,7 | -123,1 |
| Total | 15,2 | -33,7 | -126,8 | -11,0 | 15,1 | 0,6 | 0,2 | -140,3 |

Yield Obligasi Indonesia 10 Tahun (%)



- Tekanan di pasar keuangan mereda, khususnya di pasar surat berharga negara (SBN)
- **Yield obligasi menurun** ke posisi awal tahun meskipun kepemilikan asing belum pulih
- **Burden-sharing dan koordinasi Moneter - Fiskal** turut berkontribusi terhadap sentimen positif di pasar SBN
 - ✓ “Even by the dramatic standards of economic stimulus in the age of coronavirus, Indonesia stands out” (Bloomberg Opinion, 9 Juli).
 - ✓ Skema Burden Sharing bisa membawa dampak yang baik pada akselerasi pemulihan ekonomi sekaligus stabilnya pasar keuangan. (BCA, diberitakan Kontan 19 Juli).



PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN
PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL (PEN)

The graphic design on the right side of the slide features a blue ambulance icon with a white cross, positioned above a horizontal line of four colored dots (blue, yellow, orange, grey). Below this, there is a stylized white silhouette of a person in traditional Indonesian attire, possibly a dancer or performer, set against a background of a faint city skyline and a large white feather graphic.

Perpres 72/2020 Menampung Biaya Penanganan Covid-19 Rp695,2 T



Untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM, dunia usaha, dan Pemda



Kesehatan

Rp87,55 T

1. Belanja Penanganan Covid-19 Rp65,80T;
2. Insentif Tenaga Medis Rp5,90T;
3. Santunan Kematian Rp0,30T;
4. Bantuan Iuran JKN Rp3,00T;
5. Gugus Tugas Covid-19 Rp3,50T; &
6. Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05T



Perlindungan Sosial

Rp203,90T

1. PKH Rp37,40T; → Rp36.99T (Perpres 72/20)
2. Sembako Rp43,60T; → Rp43.12 (Perpres 72/20)
3. Bansos Jabodetabek Rp6,80T;
4. Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T; (Rp0.33T biaya distribusi)
5. Pra Kerja Rp20,00T;
6. Diskon Listrik Rp6,90T;
7. Logistik / Pangan / Sembako Rp25,00T; &
8. BLT Dana Desa Rp31,80T → Rp21 (refocusing)



Sektoral K/L & Pemda

Rp106,11 T

1. Program Padat Karya K/L Rp18,44T;
2. Insentif Perumahan Rp1,30T;
3. Pariwisata Rp3,80T;
4. DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T;
5. Cadangan DAK Fisik Rp8,70;
6. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T; &
7. Cadangan Perluasan Rp58,87T



UMKM

Rp123,46 T

1. Subsidi bunga Rp35,28T;
2. Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78T;
3. Belanja IJP Rp5,00T;
4. Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) Rp1,00T;
5. PPh Final UMKM DTP Rp2,40T; &
6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1,00T



Pembiayaan Korporasi

Rp53,57 T

1. Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya Rp3,42T
2. PMN Rp20,50T (HK Rp7,5T, BPUI Rp6T, PNM Rp1,5T, ITDC Rp0,5T, PPA Rp5T)
3. Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja Rp29,65T (Garuda Rp8,5T, KAI Rp3,5T, PTPN Rp4T, KS Rp3T, Perumnas Rp0,65T, PPA Rp10T)



Insentif Usaha

Rp120,61T

1. PPh 21 DTP Rp39,66T (termasuk cadangan perluasan cakupan sektor dan jangka waktu insentif Rp. 14T);
2. Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T;
3. Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T;
4. Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T;
5. Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T; &
6. Stimulus Lainnya Rp26,00T (cadangan perluasan cakupan sektor dan jangka waktu)

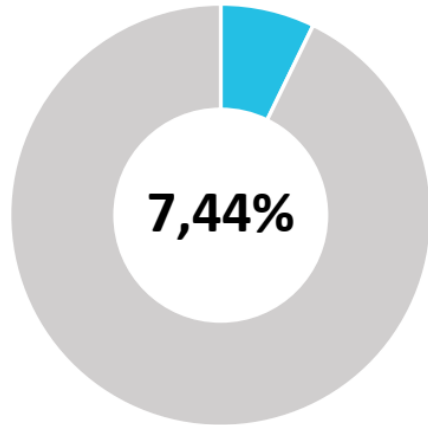
Realisasi Penanganan Covid-19 & Program Pemulihan Ekonomi Nasional



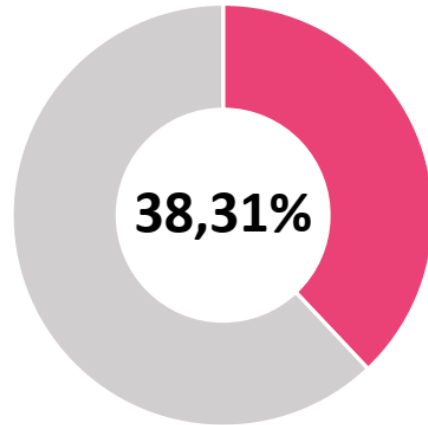
Pelaksanaan di Level Operasional & Proses Administrasi Masih Menjadi Tantangan.



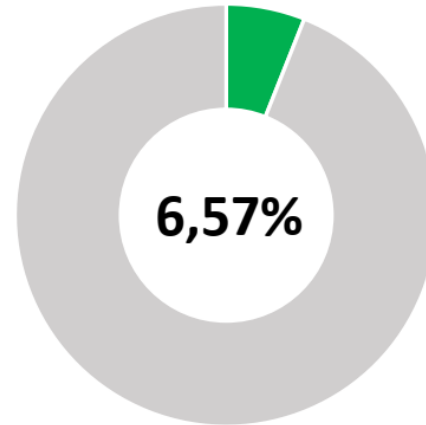
KESEHATAN



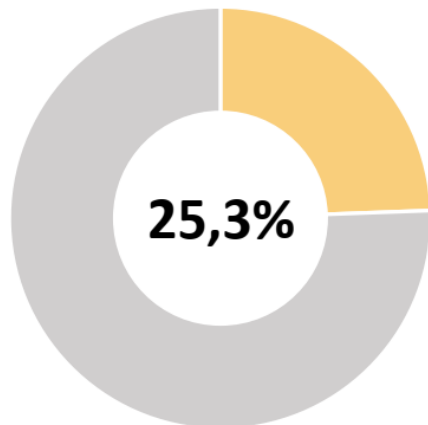
PERLINDUNGAN SOSIAL



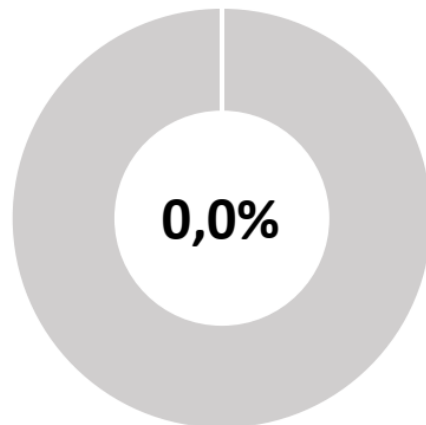
SEKTORAL DAN PEMDA



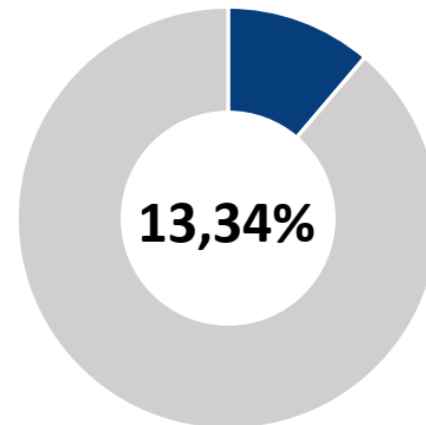
UMKM



PEMBIAYAAN KORPORASI



INSENTIF USAHA



Beberapa perbaikan untuk percepatan realisasi yang perlu dilakukan:

- Mempercepat penyelesaian regulasi dan penyederhanaan administrasi
- Mempercepat implementasi program untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha
- Memperkuat komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran publik, pemanfaatan stimulus, serta mendapatkan feedback.

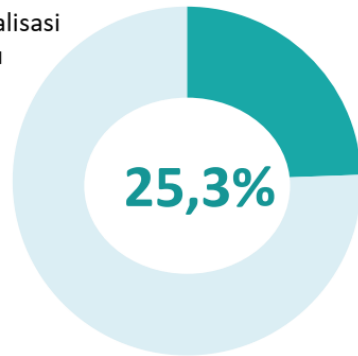
Progres Pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan PEN: *Insentif Usaha, Pembiayaan Korporasi, Dukungan UMKM*



Masih terkendala proses administrasi dan regulasi untuk tetap menjaga akuntabilitas.

UMKM

Persentase realisasi terhadap Pagu



Program dukungan untuk UMKM sudah mulai bergulir

Pagu Rp123,47 T

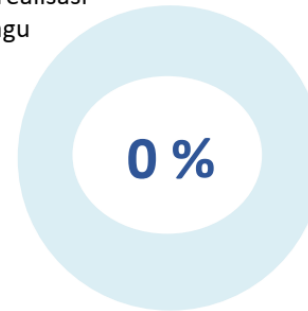
- DIPA Rp40,3 T
- Belum DIPA Rp83,18 T

Realisasi Rp30,21 T

- Penempatan dana pada Bank Himbara Rp30T
- Subsidi bunga KUR dan non-KUR sudah ada pencairan tagihan
- Perbankan/Perusahaan Pembiayaan/Lembaga penyalur didorong untuk segera menyampaikan tagihan.

PEMBIAYAAN KORPORASI

Persentase realisasi terhadap Pagu



Penyerapan diharapkan akan segera terealisasi untuk PMN BUMN

Pagu Rp53,57 T

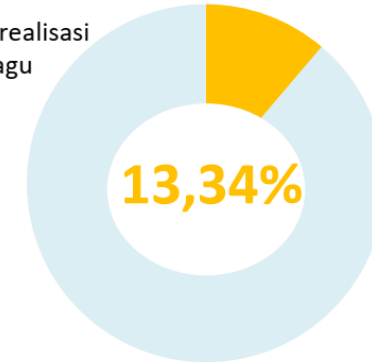
- DIPA -
- Belum DIPA Rp53,57 T

Realisasi -

- Regulasi selesai, akan segera dilakukan proses DIPA dan mulai dilakukan pencairan akhir Juli 2020

INSENTIF USAHA

Persentase realisasi terhadap Pagu



Pemanfaatan insentif perpajakan oleh pelaku usaha masih belum optimal.

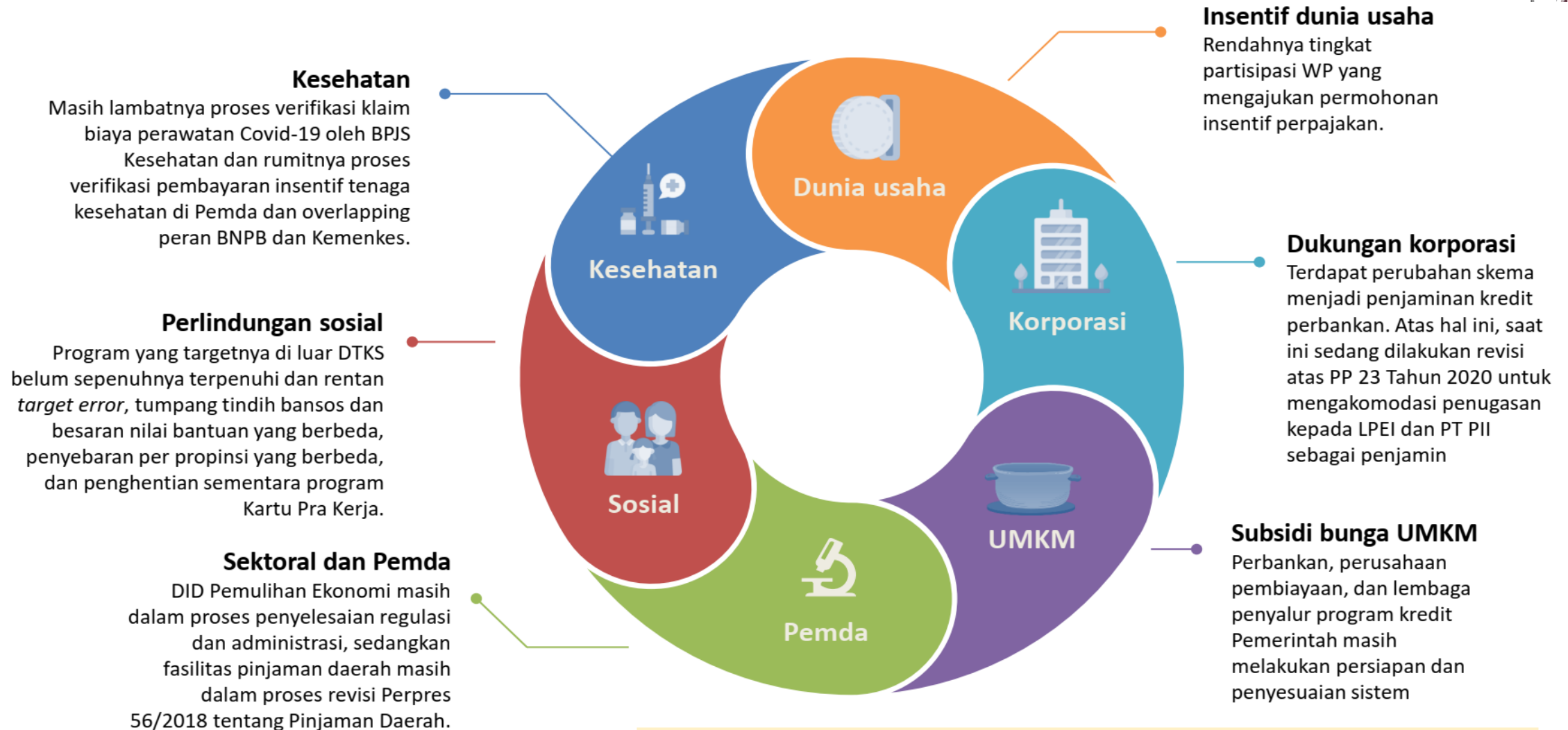
Pagu Rp120,61 T

- DIPA Rp54,95 T (Insentif/SF Pajak)
- Belum DIPA Rp65,66 T

Realisasi Rp16,2 T

- Mayoritas KBLI (KLU) sudah memanfaatkan insentif
- Pemanfaatan insentif fiskal akan meningkat seiring dengan *recovery* ekonomi
- Perlu **sosialisasi yang lebih masif** dan melibatkan stakeholders terkait

Dinamika dalam Pelaksanaan Stimulus Fiskal



Dalam rangka memitigasi terjadinya pelanggaran dan *fraud* atas pelaksanaan Program PEN, telah dilaksanakan koordinasi dengan APH dan KPK.



ARAH KEBIJAKAN EKONOMI & FISKAL 2020-2021



Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diproyeksi Tumbuh 4,5%-5,5%, Dipengaruhi Faktor Covid-19, Reformasi Struktural & Ekspansi Fiskal



FAKTOR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI 2021

Keberhasilan Penanganan Covid-19

- Penemuan vaksin masih terus berlangsung sehingga belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 berakhir
- 2021 dihadapkan Covid-19 yang *escalating*, *flattening*, atau *declining*

Akselerasi Reformasi

- Reformasi untuk produktivitas, daya saing & iklim investasi:

Omnibus Law CiKa

Reformasi Anggaran

Lembaga Pengelola Investasi

- Efektivitas implementasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

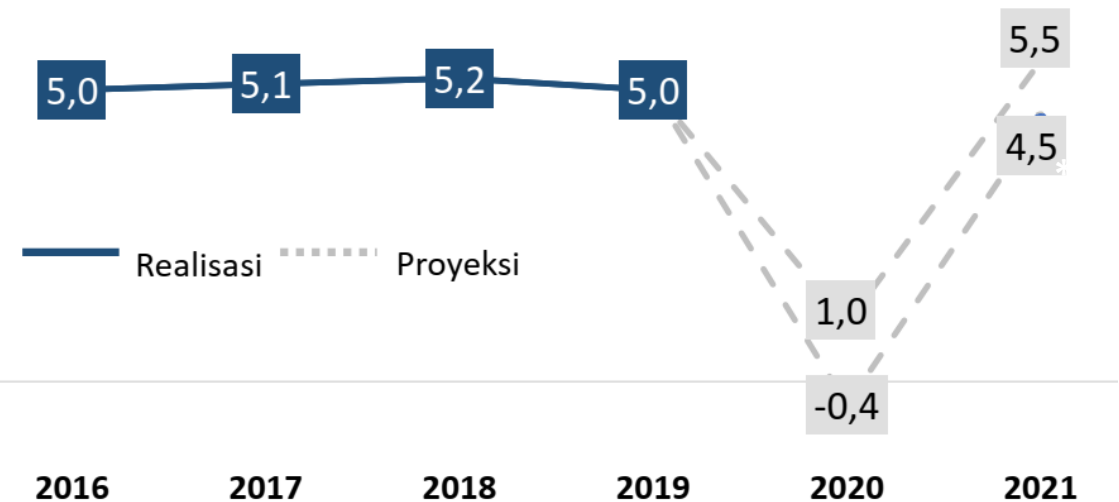
Pertumbuhan Global

- Proyeksi pertumbuhan ekonomi global membaik walau masih penuh ketidakpastian

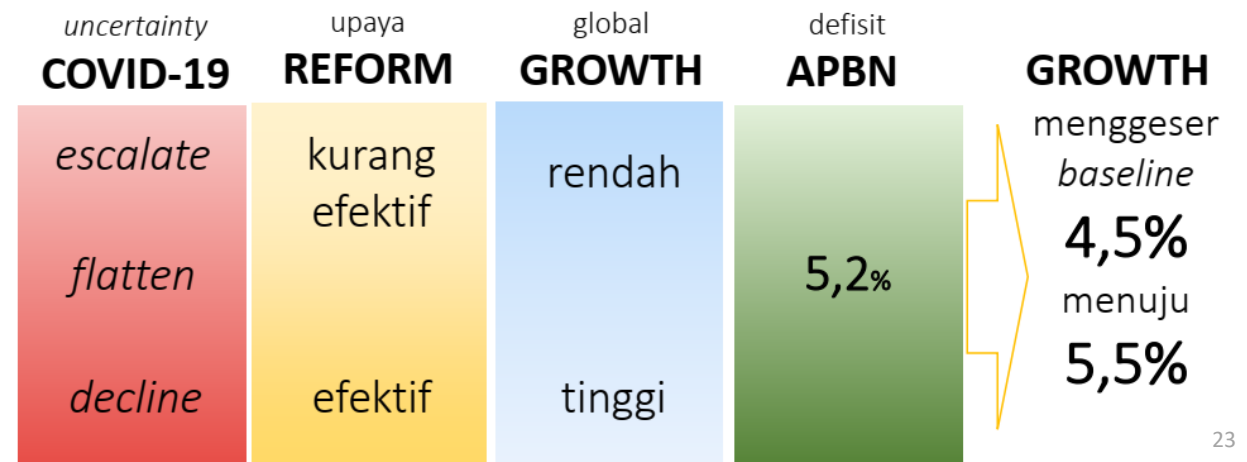
Dukungan Ekspansi Fiskal Melanjutkan Program PEN

- Dukungan pemulihan *demand* melalui penguatan bansos & BLT
- Dukungan pemulihan *supply* fokus pada insentif pajak, serta bantuan kredit & penjaminan bagi UMKM dan korporasi
- Defisit APBN 2021 disesuaikan menjadi 5,2% terhadap PDB

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% , yoy)



SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2021



ARAH KEBIJAKAN REFORMASI FISKAL 2021

Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Momentum Reformasi Untuk Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju



1 REFORMASI KESEHATAN

- Penguatan **Faskes, Alkes dan Nakes**;
- Efektifitas **Program JKN**;
- Penyiapan **health security preparedness**; dan
- Penguatan **sistem Kesehatan yang terintegrasi (Pusat dan daerah)**

2 REFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Melanjutkan **social safety net untuk recovery (PKH, Sembako, Pra Kerja)**;
- Efektifitas program (integrasi/sinergi antar program); dan
- **Mempersipakan Social safety net yang adaptative** terhadap bencana / resesi ekonomi (**automatic stabilizer**).

3 REFORMASI PENDIDIKAN

- Digitalisasi infrastruktur pendidikan;
- Penguatan **kompetensi guru**;
- **Simplifikasi kurikulum dan penguatan karakter**;
- Pengukuran berbasis **standar global**;
- **Link and match** dan penguatan PAUD; dan
- Koordinasi **pusat dan daerah, masyarakat**.

4 DUKUNGAN INDUSTRI

- **Insentif fiskal** untuk pemulihan dunia usaha;
- **Omnibus law CIKA dan perpajakan** untuk dorong investasi dan kesempatan kerja; dan
- Dukungan **transformasi ekonomi**.

5 REFORMASI TKDD

- Penguatan **quality control** terhadap TKDD;
- Mendorong TKDD berbasis hasil (**result based**);
- TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan (Kesehatan, **social safety net**, Pendidikan); dan
- Mendorong **integrated funding**.

6 REFORMASI PERPAJAKAN

- Pemberian **insentif fiskal untuk pemulihan** (sektor yang mempunyai daya ungkit);
- **Relaksasi prosedur** untuk mempercepat pemulihan ekonomi;
- **Perluasan basis pajak** (peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan, serta pelaksanaan 5 (lima) pilar reformasi, yi: organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi);
- Pemberian **insentif untuk vokasi dan litbang**, serta perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; dan
- **Ekstensifikasi barang kena cukai**.

7 REFORMASI PENGANGGARAN

- Efisiensi kebutuhan dasar → **efisiensi** belanja birokrasi;
- Fokus terhadap program prioritas (**Zero based budgeting**);
- Berorientasi pada hasil (**result based**); dan
- Menyiapkan strategi untuk antisipasi ketidakpastian yang lebih solid (**automatic stabilizer**).

Kebijakan Pelebaran Defisit dalam RAPBN 2021



Latar Belakang

- **Ketidakpastian ekonomi global dan domestik masih sangat tinggi** nampak dari penurunan proyeksi pertumbuhan
- Seiring dengan relaksasi/normalisasi, **kasus Covid-19 meningkat yang dapat memberikan hambatan pada pemulihan ekonomi**
- **Langkah-langkah penanganan Covid-19 harus tetap dilakukan**

Kebijakan

- Dalam pembicaraan pendahuluan, DPR telah menerima rancangan awal defisit 2021 sebesar 3,21% - 4,17% terhadap PDB. Dalam catatan kesimpulan DPR mengindikasikan defisit dapat diperlebar menjadi 4,7% untuk pemulihan ekonomi.
- Dalam Sidang Kabinet 29 Juli 2020, **Presiden memutuskan untuk memperlebar defisit 2021 menjadi 5,2%.**
- Dengan defisit 5,2%, maka **terdapat cadangan belanja Rp179 T** yang akan diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional 2021: **ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ICT, bidang pendidikan, bidang kesehatan khususnya untuk penanganan Covid-19 dan penyediaan vaksin.**
- Pemerintah akan memfokuskan APBN 2021 untuk pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan secara lebih cepat.

Presiden akan menyampaikan RUU APBN 2021 & Nota Keuangan pada 14 Agustus 2020



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

• • • •

TERIMA KASIH



pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id



<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/>





SISTEM PENGARSIPAN COVID-19 SECARA PARTISIPATIF

“Inovasi Kebijakan saat Pandemi Covid-19: Pembangunan Sistem crowdsourcing dalam Pendokumentasian Pandemi Covid- 19 yang bersifat Kontributif dan Partisipatif dari Masyarakat Luas”

Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si

JUMLAH KASUS COVID-19

DUNIA

(SUMBER WHO PER 4 AGUSTUS 2020,
[HTTPS://COVID19.WHO.INT/TABLE](https://COVID19.WHO.INT/TABLE))

18.142.718

Jumlah Kasus
Terkonfirmasi

691.013

Jumlah Meninggal



INDONESIA

(SUMBER SATGAS COVID PER 4 AGUSTUS 2020,
[HTTPS://COVID19.GO.ID/PETA-SEBARAN](https://COVID19.GO.ID/PETA-SEBARAN))

115.056

Jumlah Kasus
Terkonfirmasi

5.388

Jumlah Meninggal

DAMPAK DAN PENANGANAN

Dampak Covid-19 bagi Indonesia:

- Ekonomi Mikro
- PHK Karyawan-Pengangguran

Penanganan Covid-19:

- Menyerap Anggaran yang Besar
- Mempengaruhi Kinerja Pemerintah

Penyelamatan Arsip, Kebijakan dan Penanganan Arsip Covid-19:

- Sebagai pertanggungjawaban (*public accountability*)
- Sebagai sumber pembelajaran, → apabila menghadapi bencana tidak gagap lagi

PEMBENTUKAN MEMORY KOLEKTIF BANGSA

Arsip pemerintahan



PERAN ANRI DALAM COVID-19

Dasar Hukum: Amanat UU 43/2009 Tentang Kearsipan Dan SE MenPan RB 62/2020 Tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ANRI Harus Menyelamatkan Arsip Covid-19 Sebagai Arsip Vital Negara

Peran ANRI

ANRI harus menyimpan covid-19 secara khusus, bukan hanya menjadi arsip negara ttp juga arsip masyarakat

Sumber arsip yang diselamatkan adalah: institusi pemerintah yang melaksanakan penanganan covid-19 dan yang terkait lain

REALITAS LAPANGAN

Yang terlibat dalam penanganan covid-19, bukan hanya institusi pemerintah tetapi juga dunia bisnis, kalangan professional, dan masyarakat dari berbagai komponen

KENDALA ANRI

1. ANRI memiliki keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan sumberdaya finansial (operasional)
2. Kalangan masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan covid-19 tidak teridentifikasi, sehingga ANRI tidak punya akses

SOLUSI

1. ANRI harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyerahkan arsip, data, dan informasi tentang covid-19
2. ANRI harus menyediakan **sistem penyelamatan arsip bersifat partisipatif (*crowdsourcing*)**
3. ANRI harus menyediakan sarana pendukung berupa: aplikasi, data center, jaringan, sistem penyimpanan. dan sistem penyajian kembali kepada masyarakat

**“ARSIP-NEGARA, SECARA NASIONAL MERUPAKAN CERMIN
MANAJEMEN PENGELOLAAN URUSAN NEGARA”**



TERIMA KASIH

